

Pembangunan Ekowisata *Pada Kawasan Hutan Produksi*

Manajemen dan Pengembangan Ekowisata

· Editor:

Prof. Dr. Ir. Dudung Darusman, MA

Dr. Ir. Ricky Avenzora, M.Sc.F



PROGRAM STUDI PASCA SARJANA
MANAJEMEN EKOWISATA DAN JASA LINGKUNGAN
FAKULTAS KEHUTANAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
2013

DAFTAR ISI

Bagian I.	Ekonomi Sumberdaya Hutan Berkelanjutan di Hutan Produksi (Dudung Darusman & Bahruni Said)	1
Bagian II.	Pemanenan Hutan Berkelanjutan di Hutan Produksi (Juang Rata Matangaran).....	35
Bagian III.	Ekoturisme: <i>Teori dan Implikasi</i> (Ricky Avenzora)	61
Bagian IV.	Potensi Ekowisata di Hutan Produksi Areal Kerja IUPHHK PT. Agathis Alam Indonesia (Ricky Avenzora, Tutut Sunarminto, Insan Kurnia, Laridzae Ade Mulya, Mario Genasara, & Teguh Pradityo)	97
Bagian V.	Studi Potensi Ekowisata di Desa Tumbang Topus dan Pegunungan Muller Kalimantan Tengah (Ricky Avenzora, Tutut Sunarminto, Oktovianus, Ehsan Ilahi Zhair & Ian Abdillah)	179
Bagian VI.	Optimalisasi Manfaat Hutan Produksi Melalui Ekowisata (Dudung Darusman, Ricky Avenzora, & Tb. Unu Nitibaskara)	223

EKOTURISME ~ Teori dan Implikasi ~

Oleh :
Ricky Avenzora

Pendahuluan

Secara global, paradigma pembangunan pariwisata telah bergeser - sejak lebih dari tiga dekade yang lalu - dari bentuk *mass tourism concept* ke suatu konsep baru yang penamaan ataupun pengertiannya dapat dikatakan belum tuntas. Untuk berbagai ide yang sama tentang pentingnya mempertimbangkan aspek-aspek ekologi dan sosio-budaya dalam pembangunan pariwisata, berbagai pihak telah menggunakan berbagai terminologi yang malah cenderung sangat membingungkan. Beberapa contoh terminologi yang digunakan adalah *ecotourism, soft tourism, nature based tourism, green tourism, low impact tourism, small scale tourism, low density tourism, responsible tourism, alternative tourism, sustainable tourism, ecological tourism, discreet tourism*, dsb (untuk contoh berikutnya lihat Mieczkowski, 1995, p. 458; Ellenberg, Marion dan Birgit, 1997, p.56; Shaw dan Allan, 1994, p.245). Belum mantapnya terminologi dan batasan *ecotourism* juga diakui secara eksplisit oleh Weaver (2001, p.1) editor *Encyclopedia of Ecotourism* yang menyatakan: ".....they suggest areas in which some degree of consensus or cohesion maybe emerging: indicators, perhaps, that ecotourism is moving toward a higher level of maturity".

Berbagai kerancuan terminologi dan pengertian di atas - yang berujung pada kekeliruan dalam berbagai usaha implementasinya - juga terjadi di Indonesia. Minimal ada tiga alasan mendasar yang dapat dikemukakan sebagai penyebab, yaitu: (1) terbatasnya ketersediaan literatur tentang pariwisata (secara umum) dan ekowisata (secara khusus) merupakan alasan klasik yang banyak dikemukakan oleh berbagai pihak, (2) cukup banyaknya "*amateur-players*", dan (3) secara objektif harus diakui bahwa selama ini pengembangan dan perkembangan ilmu pariwisata di Indonesia hanyalah terfokus pada manajemen akomodasi dan manajemen perjalanan. Dengan berbagai keterbatasan literatur yang ada, sebenarnya banyak pihak di Indonesia yang telah mencoba menyumbangkan gagasan dan pikirannya tentang *ecotourism*. Pada dasarnya, apa yang mereka coba untuk sumbangkan dapat dianggap sebagai hal yang memperkaya dinamika proses kematangan suatu ilmu, namun demikian dominansi ego individual, sektoral dan keahlian akhirnya lebih sering menjadikan mereka, secara objektif, harus dikategorikan sebagai "*amateur-players*" yang berpikir dan bertindak hanya pada tataran "*mitos-pariwisata*". Naifnya, dengan sedikit atau berbagai perjalanan wisata yang pernah dilakukan dan dengan pengetahuan atau ilmu yang mereka miliki tentang ekonomi makro misalnya (sejalan dengan banyaknya literatur yang beredar umumnya hanyalah memandang pariwisata dan ekowisata dalam perspektif ekonomi) maka banyak pihak telah merasa mengerti dan bahkan merasa ahli dalam bidang pariwisata. Selanjutnya, karena menguasai sedikit atau berbagai pengetahuan dari kelompok ilmu biologi dan ekologi, mereka juga tidak segan-segan untuk mengklaim diri mereka sebagai ahli ekowisata.

Setelah lebih dari 30 tahun mencuatnya terminologi ekowisata di Indonesia - dengan berbagai usaha implementasinya yang telah dicoba untuk dilaksanakan - maka barangkali sudah saatnya untuk mengevaluasi dan menata ulang batasan dan pengertian dan implementasi tentang

ekowisata tersebut. Untuk itu, maka dalam tulisan ini penulis akan mencoba melakukan evaluasi deskriptif-kualitatif tentang berbagai konsep yang ada. Untuk memudahkan pembaca memahami alur evaluasi, maka selanjutnya terlebih dahulu akan dijabarkan sedikit *pandangan teoritis* sebagai acuan; yang dilengkapi dengan uraian tentang dinamika perubahan tersebut. Berikutnya akan dipaparkan tentang sisi positif dan negatif dari beberapa definisi serta implikasi penting dari konsep yang ada, dan sebagai penutup pada akhir tulisan akan disampaikan beberapa kesimpulan dan saran.

Telaah Atas Konsep

Waktu Luang, Rekreasi dan Pariwisata

Secara alamiah, pariwisata adalah bersifat multi-sektoral, yaitu merupakan kombinasi berbagai komponen dan aspek pengetahuan yang harus diintegrasikan dalam suatu kesatuan dinamika pengetahuan, ilmu serta seni. Untuk memudahkan mempelajarinya maka dapat dilakukan penyederhanaan, yaitu dengan mengenali determinan yang sangat signifikan mempengaruhi berbagai aspek dalam *tourism*, yaitu: (1) ruang, dan (2) waktu. Mudah untuk dimengerti bahwa bagaimanapun juga "ruang" dan "waktu" akan selalu mempengaruhi karakteristik setiap komponen dan aspek yang terlibat dalam *tourism*.

Untuk memahami *tourism* dari variabel "waktu", fokus analisa dapat diarahkan pada "alokasi waktu" (*time-budget*) dari setiap individu atau populasi dalam memanfaatkan waktu, yang polanya dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu: (1) *existence time*, (2) *subsistence time*, dan (3) *leisure time*. Terminologi *existence time* digunakan untuk menggambarkan waktu yang digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan dasar harian mereka, seperti mandi, makan, tidur, dan istirahat. *Subsistence time* merupakan terminologi yang digunakan untuk menggambarkan waktu yang mereka gunakan guna melaksanakan aktifitas yang mereka perlukan untuk bisa terpenuhinya kebutuhan dasar mereka. Sedangkan, *leisure time* merupakan waktu dimana mereka bebas melakukan aktivitas lain setelah berbagai *existence and subsistence activities* terpenuhi.

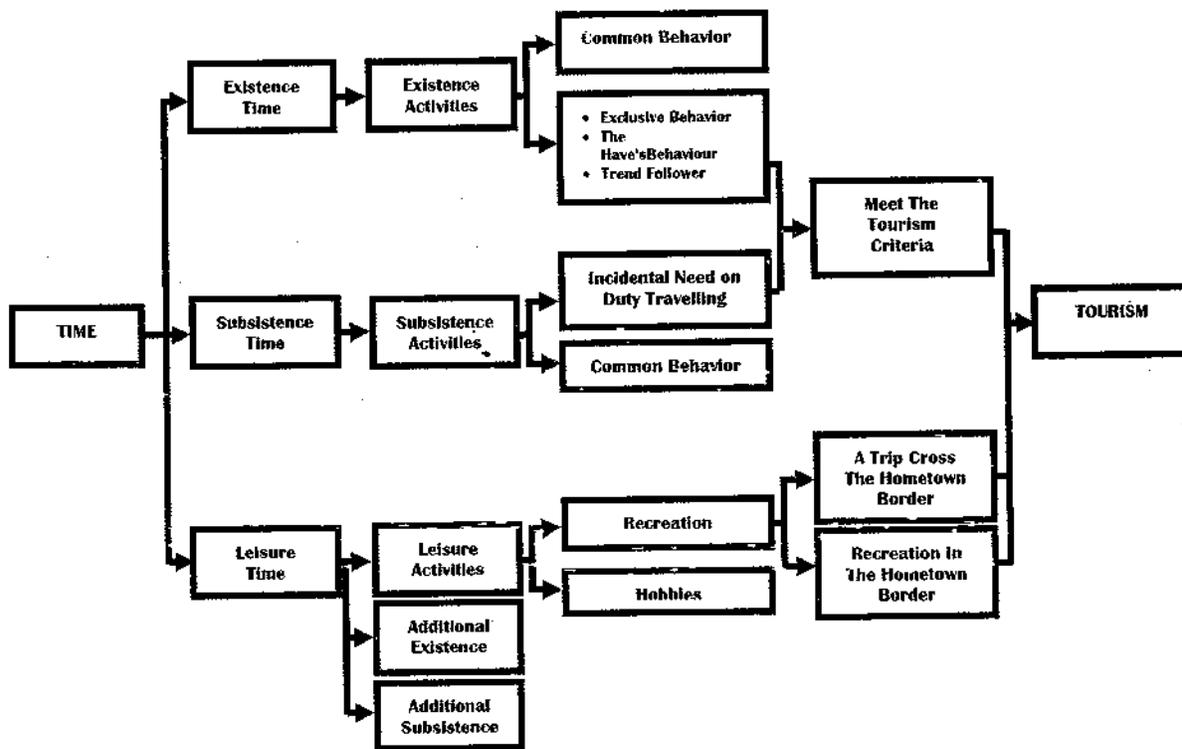
Secara sistematis, *time-budget* dapat digambarkan sebagaimana tertera pada Gambar 11. Dari skema tersebut jelas terlihat bahwa *leisure* hanyalah salah satu aktivitas alternatif yang dapat dipilih oleh manusia dalam memanfaatkan *leisure time* mereka. Dan harus pula dipahami bahwa *recreation* juga hanyalah salah satu pilihan yang dapat mereka pilih diantara berbagai alternatif *leisure activities* lainnya.

Dalam konteks *leisure studies* ada dua hal penting yang perlu dimengerti secara baik, yaitu: (1) *the leisure time pattern*, dan (2) *the pattern of leisure activities*. Pola waktu luang (*leisure time pattern*) perlu untuk dimengerti guna mengukur peluang dan/atau kebutuhan rekreasi yang dapat dan/atau dibutuhkan oleh individu/populasi dalam waktu luang mereka. Sedangkan pola pemanfaatan waktu luang (*the pattern of leisure activities*) mengilustrasikan tingkat partisipasi yang secara aktif diambil oleh individu atau populasi dalam memanfaatkan waktu luang mereka.

Dalam konteks permintaan (*demand*) dan pasok (*supply*), pengetahuan tentang rekreasi dapat disimplifikasikan melalui pengertian yang baik tentang *recreation demand* dan *recreation supply*. Berbicara tentang *recreation demand* adalah berbicara tentang: (1) siapa yang meminta, (2) apa yang diminta, (3) berapa banyak yang diminta, (4) kualitas yang diminta dan (5) kapan diminta. Sedangkan berbicara tentang *recreation supply* dapat dipahami melalui pengertian tentang: (1) apa yang bisa dipasok, (2) berapa banyak yang dapat diberikan, (3) kapan dapat diberikan, (4)

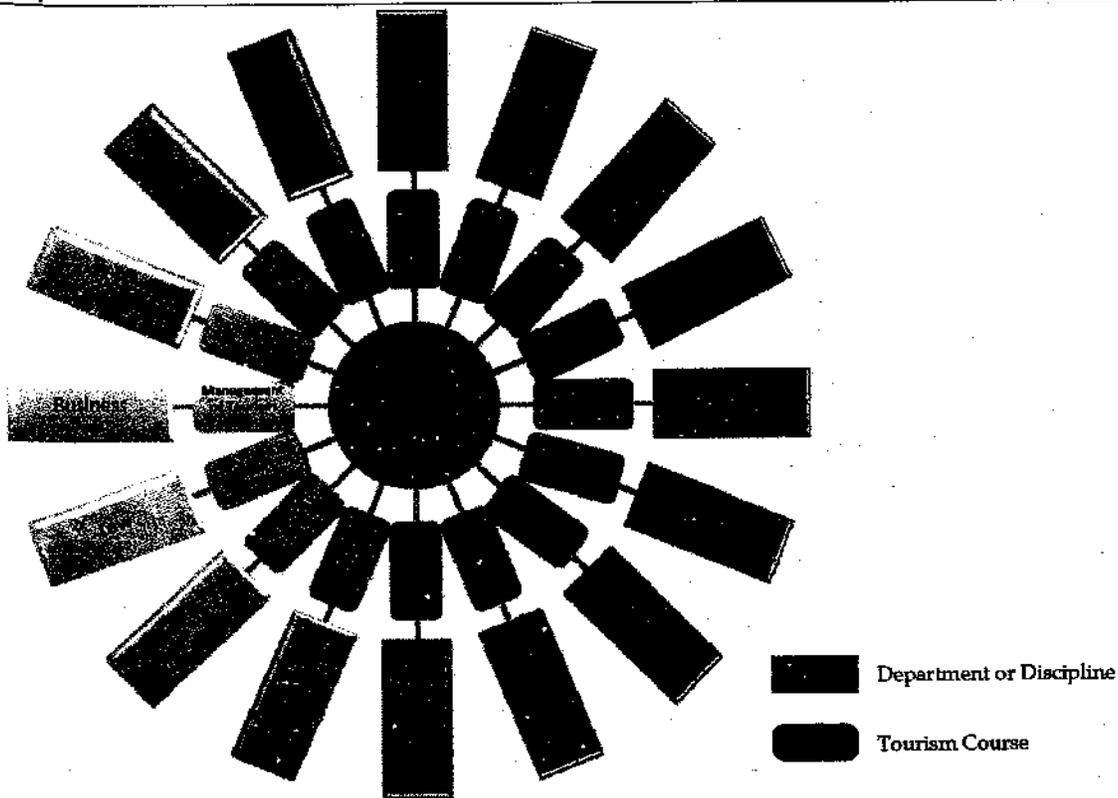
seperti apa kualitas yang bisa dipasokan dan (5) kepada siapa dapat diberikan. Sejalan dengan pendekatan *waktu* dan *ruang* yang telah dikemukakan di atas, maka *recreation-resources* yang akan disediakan tersebut dapat didefinisikan sebagai: "suatu ruang tertentu dengan batas-batas tertentu yang mengandung elemen-elemen ruang tertentu pula yang dapat : (1) menarik minat orang untuk berekreasi, (2) menampung kegiatan rekreasi, dan (3) memberikan kepuasan orang berekreasi".

Meskipun WTO telah mengeluarkan definisi *tourism*, pada kenyataannya berbagai negara anggotanya memberlakukan definisi yang berbeda-beda. Sebagai contoh, USA menyatakan perlunya turis untuk melakukan "*over night*" sebagai syarat perjalanan mereka dapat dihitung dalam pendataan statistik mereka, sementara Canada tidak (Smith 1989, p. 78). Dari berbagai definisi yang ada, dapat disimpulkan bahwa definisi yang dibangun semata-mata lebih tertuju untuk memfasilitasi proses pencatatan statistik.



Gambar 11. Skema *Time-Budget* (after Avenzora, 2003)

Untuk mempelajari kompleksitas dalam *tourism*, suatu model yang diajukan oleh Ja'fari (dalam Cooper *et al.*, 1999, p. 4) dapat dipertimbangkan sebagai suatu model yang baik dan komprehensif (lihat Gambar 12). Model tersebut menggambarkan berbagai aspek yang dibutuhkan untuk mendukung suatu pembangunan pariwisata, dan sekaligus menunjukkan betapa kompleksnya studi tentang *tourism*. Dengan mengenali berbagai komponen yang terlibat, maka akan lebih mudah untuk memahami interdependensi yang ada.



Gambar 12. Ja'fari Model (cited in Cooper et. al, 2001)

Untuk memahami pengertian *tourism*, maka beberapa definisi dan pengertian berikut kiranya dapat membantu:

- ❖ *Tourism is a trip of excursion usually ending at the point of beginning* (Webster's Dictionary, 1996).
- ❖ *Tourism is concerned with all travelers visiting foreign parts, whether it be for pleasure, business, or combination of two* (Murphy, 1985, p.5).
- ❖ *Tourism is the sum of the phenomena and relationships arising from the travel and stay of non resident: in so far they do not lead to permanent resident and are not connected to any earning activity* (Holloway, 1985, p.2).
- ❖ *Principally tourism includes holiday trips, visit to friend and relatives, and business trips, involving at least one night away from home* (Prentice, 1993, p. 2).
- ❖ *Tourism is the set of ideas, the theories and ideologies for being a tourist, and it is the behaviour of people in touristic roles when the ideas are put into practice* (Leiper, 1990; cited in Moore, Cushman and Simmons, 1995, p.71).

Batasan-batasan dan pengertian tersebut di atas kembali menunjukkan perbedaan pengertian tentang *tourism*. Batasan dan pengertian yang dikemukakan oleh Holloway bahkan mencirikan ambiguitas antara *tourism* dan *recreation*. Dalam berbagai literatur, "not connected to any earning activity" adalah dikhususkan untuk mendefinisikan *recreation*. Secara umum para akademisi telah sepakat atas 5 karakteristik rekreasi, yaitu: (1) harus dilaksanakan dalam waktu luang, (2) tidak terpaksa, (3) menyenangkan, (4) tidak terikat akan aturan tertentu, dan (5) tidak untuk mencari nafkah (sebagai contoh lihat Clawson and Knetsch, 1969).

Mathieson dan Wall (1982) menyatakan bahwa wisatawan adalah suatu komponen yang vital dalam mendiskusikan *tourism*. Dengan demikian pengetahuan tentang tipologi wisatawan adalah sangat penting. Murphy (1985, p. 6) telah mencoba merekapitulasikan berbagai tipologi "tourist", yaitu sebagaimana tertera pada Tabel 21. Sedangkan tipologi yang dibuat oleh Plog (1987 cited in Lowyck, Langenhoven, and Bollaer, 1992) dapat dipandang sebagai tipologi sederhana untuk mengenal berbagai tipe dasar "wisatawan", yaitu:

- ❖ *Venture-someness tourist*: wisatawan aktif mencari dan mengeksplorasi sumberdaya wisata serta berkecenderungan untuk menjadi pengguna pertama dari berbagai destinasi yang ditemukannya.
- ❖ *Pleasure-seeking tourist*: wisatawan membutuhkan sejumlah kenyamanan dan kemewahan dalam semua aspek perjalanan, transportasi, jasa akomodasi dan entertain.
- ❖ *Impassivity tourist*: wisatawan membuat keputusan perjalanan dan kegiatan wisatanya sangat cepat, pada saat momen-momen terakhir. Meskipun banyak penulis yang mengkategorikan wisatawan dari kelompok ini adalah tidak mempunyai perencanaan atas perjalanan dan kegiatan wisata yang mereka lakukan, namun sesungguhnya fase perencanaan tetap ada di dalam keputusannya; meskipun terjadi dengan proses yang sangat *simple* dan cepat.
- ❖ *Self-confidence tourist*: wisatawan dari kelompok ini selalu berkeinginan untuk melakukan sesuatu yang bersifat berbeda dari wisatawan lain. Hal ini umumnya mereka wujudkan dalam pemilihan kegiatan dan destinasi yang umumnya berbeda dari aktivitas dan destinasi wisatawan lain.
- ❖ *Planfulness tourist*: wisatawan yang selalu terlebih dahulu merencanakan perjalanan mereka dengan baik, namun lebih cenderung memilih perjalanan yang tergolong *pre-package tour programmes* dari pada paket-paket perjalanan yang disediakan oleh berbagai *tour operator*.
- ❖ *Masculinity tourist*: wisatawan yang mempunyai orientasi untuk menunjukkan aksi-aksi maskulinitas, dimana pilihan kegiatan dan destinasinya adalah terorientasi pada kegiatan-kegiatan di luar ruangan (*outdoor activity*) yang bersifat tradisional. Wisatawan dari kelompok ini cenderung untuk mendorong istri dan anggota keluarganya untuk ikut serta, atau bahkan meninggalkannya sama sekali di rumah.
- ❖ *Intellectualism tourist*: wisatawan yang sangat mementingkan aspek sejarah dan adat serta budaya dari destinasi wisata yang akan dikunjunginya.
- ❖ *People orientation tourist*: wisatawan yang mempunyai keinginan untuk memiliki kontak sosial yang berkualitas dengan masyarakat dari destinasi wisata yang mereka kunjungi.

Tabel 21. Rekapitulasi Tipologi Wisatawan (Plog, 1987)

Model	Jenis Pengalaman	Karakter Permintaan	Dampak pada Destinasi
Interactional Models Cohen (1972)			
Non-Institutionalized traveler	Drifter	Mencari lingkungan yang eksotik dan unik	Dampaknya kecil sejalan dengan jumlahnya yang kecil.
	Explorer	Merencanakan perjalanannya secara mandiri dan berusaha untuk keluar dari rute yang umum digunakan.	Kecukupan fasilitas lokal dan kontak dengan masyarakat lokal sangat didambakan.
Institutionalized traveler	Individual mass tourist	Perjalanan mereka dirancangan oleh agen perjalanan yang mereka pilih, biasanya menuju destinasi-destinasi yang sudah populer.	Menumbuhkan komersialisasi dan spesialisasi pada destinasi sejalan dengan tumbuhnya permintaan.

Tabel 21. (lanjutan)

Model	Jenis Pengalaman	Karakter Permintaan	Dampak pada Destinasi
Interactional Models Cohen (1972)			
Institutionalized traveler	Organized mass tourist	Mencari sesuatu yang sudah dianggap <i>familiar</i> di dalam rentang lingkup lingkungannya sendiri yang diyakini aman dan umumnya dilakukan dalam bentuk perjalanan terpimpin	Terdorongnya pembangunan fasilitas yang bersifat artifisial, investasi asing, dan mengurangi kontrol masyarakat lokal.
Smith (1977b)	Explorer	Mencari penemuan dan berkeinginan untuk berinteraksi dengan masyarakat lokal.	Mudah untuk menerima kondisi yang ada dan menghargai norma lokal.
	Elite	Berwisata ke wilayah-wilayah yang tidak umum yang dipersiapkan secara konservatif.	Berjumlah kecil, dan sangat mudah beradaptasi dengan lingkungan di sekitarnya.
	Off Beat	Menjauh dari keramaian	Dampaknya sangat kecil sekali karena cenderung untuk sangat akomodatif dengan berbagai keterbatasan fasilitas dan jasa yang ada.
	Unusual	Perjalanan yang bertujuan untuk mencari area-area yang masih terisolasi yang berkaitan dengan berbagai kegiatan yang penuh resiko.	Destinasi sementara dapat bersifat sangat sederhana, namun berbagai dukungan fasilitas dan jasa dasar adalah sangat mereka butuhkan.
	Incipient Mass	Perjalanan individu atau kelompok kecil untuk mencari suatu suasana yang merupakan kombinasi antara kenyamanan dan keautentikan.	Jumlah mereka akan meningkat sejalan dengan semakin populernya destinasi yang mereka tuju, sehingga terjadi pula pertumbuhan permintaan akan jasa dan fasilitas.
	Mass	Masyarakat yang tergolong berpendapatan menengah, dimana tata nilai yang mereka miliki cenderung mendorong terciptanya pertumbuhan semu wisatawan (<i>tourist bubble</i>)	Ketika pariwisata mewujud menjadi industri utama, interaksi dengan masyarakat lokal menjadi rendah sejalan dengan meningkatnya jaringan komersial.
	Charter	Menghabiskan waktu untuk relaksasi dan bersenang-senang di suatu atmosfir dan situasi yang baru yang diyakininya aman untuk dirinya.	Sejalan dengan kedatangan wisatawan dalam jumlah besar maka keharusan akan ketersediaan fasilitas akomodasi dengan berbagai fasilitas berstandar dan bercitra negara barat.
Cognitive-normative models Plog (1972)	Allcentric	Perjalanan yang bersifat <i>adventure</i> secara berkelompok atau individual	Jumlah pengunjung yang rendah dan umumnya mereka tinggal bersama penduduk.
	Mid-centric	Perjalanan individual ke berbagai destinasi yang sedang dalam proses pertumbuhan reputasi sebagai destinasi wisata.	Meningkatnya interaksi komersialisasi antara wisatawan dan masyarakat lokal.
	Psychocentric	Perjalanan wisata menuju destinasi yang populer, yang dilakukan secara terorganisir.	Suatu bisnis wisata yang berskala besar dimana berbagai fasilitas yang disediakan hampir sama dengan negeri asal para wisatawan.
Cohen (1979a)			
Modern pilgrimage	Existential	Perjalanan wisata untuk meninggalkan kejenuhan keseharian menuju tempat-tempat tertentu yang dianggap mampu untuk memberikan semangat spiritual.	Jumlah peserta yang sedikit menjadi terabsorpsi ke dalam komunitas lokal sehingga dapat dikatakan mempunyai dampak yang rendah terhadap kehidupan lokal.

Tabel 21. (lanjutan)

Model	Jenis Pengalaman	Karakter Permintaan	Dampak pada Destinasi
Modern pilgrimage	Experimental	Mencari gaya hidup yang berbeda dan berharap untuk bisa menyatu dengan suatu pola kehidupan otentik lainnya.	Sejalan dengan jumlahnya yang kecil maka wisatawan dari kelompok ini menjadi terasimilasi dengan keadaan area destinasi
	Experiential	Mencari makna kehidupan lain untuk menikmati keauntetkannya.	Timbul beberapa dampak yang berkaitan dengan munculnya respon masyarakat lokal yang menyediakan fasilitas akomodasi dan pertunjukan budaya lokal.
Search for pleasure	Diversionary	Menghindar dari kejenuhan dan rutinitas keseharian yang diwujudkan dalam kerenderungan untuk mendapatkan terapi kebugaran.	Tergolong <i>mass-tourism</i> dengan permintaan yang tinggi atas ketersediaan fasilitas rekreasi dan <i>leisure</i> lainnya; sehingga cenderung menimbulkan dampak yang besar sejalan dengan jumlah wisatawan yang besar serta komersialisasi.
	Recreational	Perjalanan untuk bersenang-senang dan relaksasi untuk memulihkan kondisi fisik dan mental.	Terciptanya lingkungan rekreasi yang artifisial dan memberikan dampak yang besar terhadap gaya hidup.

Ekoturisme : Dinamika Makna dan Pemahaman

Secara sederhana, perubahan pada sektor pariwisata dapat dipandang dari dua hal yang mendasar, yaitu *internal dynamics* dan *external dynamics*. Secara internal, terjadinya perubahan adalah disebabkan oleh adanya pergeseran *trend* yang bersifat alamiah (*natural shift of trend*), sedangkan secara eksternal, timbulnya perubahan adalah sebagai akibat adanya tekanan politik dan gerakan lingkungan global.

Dalam perspektif sejarah (*historical back-ground*) dapat dikatakan bahwa perubahan tersebut berawal dari gerakan kembali ke alam (*back to nature*) yang mulai menyebar secara global pada awal tahun 80-an. Gerakan yang pada awalnya dapat dipandang sebagai *natural trend* telah berubah menjadi suatu gerakan formal bersamaan dengan munculnya deklarasi *World Conservation Strategy* pada tahun 1980. Bahkan pilar konservasi tersebut telah menjadi lebih kokoh dengan berdirinya lembaga *World Commission on Environment and Development (WCED)* pada tahun 1983, dimana kemudian Dokumen *Brundtland (the Brundtland Document; Usulan Dasar Hukum untuk Environmental Protection and Sustainable Development* yang diadopsi oleh *WCED Expert Group on Environmental Law*) secara tegas menekankan pentingnya mengimplementasikan konsep keberlanjutan (*sustainability concept*) dalam setiap proses pembangunan. Akhirnya, dua dokumen penting tersebut menjadi lebih kuat ketika Agenda 21 dideklarasikan di Rio de Janeiro pada tahun 1992; termasuk *Agenda 21 for Travel and Tourism*.

Selain itu, perubahan juga disebabkan oleh adanya dinamika inheren dalam *kepariwisataan* itu sendiri. Beberapa contoh variabel inheren tersebut adalah "lingkaran keingintahuan" (*the circle of curiosity*) dan preferensi. Jika kondisi berbagai variabel penentu terjadinya "perjalanan" terpenuhi, maka wisatawan (*holiday-taker*) akan cenderung untuk melakukan perjalanan wisata ke tempat atau objek yang belum pernah mereka kunjungi. Pada sisi lain, atas adanya preferensi maka tentu mudah untuk dimengerti bahwa pilihan kegiatan wisatawan tentu akan sangat bervariasi baik dalam bentuk ataupun pola aksi atas *trend* yang ada.

Federation of Nature and National Parks of Europe (FNNPE; dalam Crovsky, 1992) hanya mendefinisikan *sustainable tourism* dari sudut pandang wisatawan saja, yaitu : *"all form of tourist development, management and activity which enable a long life for the cultural activity of tourism, involving a sequence of economic tourism products, compatible with keeping in perpetuity the protected heritage resources, be it natural, cultural or built, which give rise to tourism"*. Sementara Anko (1992 dalam Baines, John et al. 1992; eds.) menyatakan: *"The idea of sustainable tourism, in my mind at least, is to make these qualities available to the people to the degree and in a manner that will guarantee their preservation for the future generations (who will likely perceive them differently than we do) and for the sake of nature itself"*.

Meskipun pemaknaan yang digunakan sangat variatif (seperti telah diuraikan pada bagian pendahuluan), sesungguhnya ide dan konsep-konsep yang melatarbelakanginya secara mendasar adalah sama. Secara umum dapat dikatakan bahwa perbedaan di antara berbagai dikotomi tersebut adalah bersumber dari *perbedaan sudut pandang* - jika tidak ingin dikatakan keterbatasan sudut pandang - yang digunakan para penulis dalam menelaah kompleksitas wisata. Cukup banyak penulis yang hanya memfokuskan analisisnya pada salah satu aspek, subjek ataupun objek yang terlibat dalam pariwisata. Sebagai contoh, para penulis yang menggunakan terminology *eco-tourism* atau *nature based tourism* umumnya hanya berorientasi pada *nature related tourism activities* (lihat Anko, 1992). Sementara itu, para penulis yang menggunakan terminologi *responsible tourism* dan *small-scale tourism* umumnya juga hanya fokus pada aspek intensitas pengunjungan belaka.

Untuk *ecotourism*, maka definisi Cebalos-Lascurian (1997), yang juga diadopsi oleh IUCN, nampaknya telah menjadi inspirasi banyak penulis dalam memahami *ecotourism*. Dia mendefinisikan *ecotourism* sebagai: *"a travelling to relatively undisturbed or uncontaminated areas with the purpose of studying, admiring, and enjoying the scenery and their wild plants and animals, as well as any existing cultural manifestation (both past and present) found in these areas"*. Sedangkan di sisi lain, Boo (1990) hanya mendefinisikan *ecotourism* sebagai *"tourism to natural areas."*

Sejalan dengan sulitnya mencapai kesepakatan tentang definisi, di sisi lain juga terjadi perdebatan panjang tentang berbagai kriteria yang diusulkan para akademisi dan praktisi. Beberapa kritik berikut barangkali dapat dijadikan sebagai contoh bentuk perdebatan diantara para akademisi, yaitu:

- ❖ Cater (1994) menyatakan keraguannya tentang implementasi berbagai konsep *ecotourism* yang ada, yaitu dengan mempertanyakan: (1) *ecotourism is a product or a principle*, (2) *the sustainability in its understanding is only a rhetoric or a reality*, and (3) *an ecotourism development is an option or a dictate*.
- ❖ *"Eco-tourism or Ego-tourism?"* adalah merupakan judul kritik yang dilontarkan oleh MUNT (1995) dalam meneropong realitas pembangunan pariwisata yang dijual di bawah label *ecotourism* pada berbagai negara berkembang pada dekade terakhir. Dia menulis: *"It (ecotourism) is the colonial emphasis on discovery and expropriation that has been rediscovered within neo-colonialism."*
- ❖ Karena hampir semua penulis meletakkan *"the first hand experience with natural environment"* sebagai prasyarat, Avenzora (1995 and 1997) mempertanyakan tentang siapa yang akan bertanggung jawab untuk merestorasi destinasi-destinasi yang telah terlanjur hancur pada era *mass-tourism*. Dia juga sangat kuat memprediksikan bahwa perilaku para *businessmen* (termasuk di daerah *past mass-tourism area*) akan selalu menggunakan kriteria tersebut untuk mengeksplorasi dan kemudian mengeksploitasi lingkungan alamiah (yang diisyaratkan banyak pihak dengan teminologi *"the new untouched natural environment"*) untuk memenuhi kepentingan ekonomi mereka dengan cara menyuplai destinasi baru ke dalam pasar wisata.

Perbedaan opini juga sangat nyata diantara para praktisi dalam mengimplementasikan konsep dan kriteria yang digunakan di bawah "bendera" ekoturisme. Polemik yang terjadi di Mallorca, sebagaimana dicatat oleh Hernandes (1986), dapat menjadi contoh yang baik untuk menggambarkan perbedaan pemahaman diantara para praktisi, yaitu:

- ❖ *The conservationist groups ordered: "Mallorquiner, verkauf deinen Grund und Boden nicht an die Deutschen, sie zerstören unsere Kultur."* (Konservasionis: "Hai Masyarakat Malorca, jangan jual tapak dan tanah anda kepada Orang-orang Jerman, mereka merusak budaya kita")
- ❖ *The liberal group (Die Gemäßigteren) said: "dieser Entwicklung müsste Einhalt geboten werden, sie müsse reguliert werden."* (Kaum Liberal: "Untuk mempertahankan lingkungan ini harus dipertahankan, mestinya anda semua membuat regulasinya")
- ❖ *The new owners (Die Anggeriftenen) defended: "Wir restaurieren die Häuser ganz genau in Stil und mit dem Material von hier; wir kümmern uns um die Natur; wir respectieren die Gebräuche."* (Pengusaha Baru : "Kami merestorasi rumah-rumah yang ada persis sebagaimana arsitektur dan material lokal, kami juga mementingkan alam dan menghargai adat budaya anda")
- ❖ *The criticsers argued the new owners by saying: "Das stimmt, ...aber ihr sperrt die Durchgangswege ab, ihr integriert euch nicht in die Bevölkerung, ihr bringt die Produkte, die ihr konsumiert, aus euren Städten in Deutschland hierher....."* (Konservasionis : "Anda benar,tapi anda merubah tatanan, tidak berintegrasi dengan masyarakat lokal, membawa berbagai barang yang anda konsumsi dari kota-kota asal anda di Jerman").

Evaluasi Atas Konsep

Untuk menyederhanakan proses evaluasi, maka pengevaluasian berbagai konsep yang ada akan difokuskan pada definisi dan batasan yang notabene menggambarkan esensi dari setiap konsep tersebut. Sebagai bahan studi, berikut ini dipaparkan berbagai definisi dan batasan *ecotourism* yang dituliskan oleh berbagai pihak, yaitu:

- ❖ *The Ecotourism Association of Australia* (1996): sebagai turisme atau kepariwisataan yang secara ekologis berkelanjutan (lestari) dan mendorong berkembangnya pemahaman (*understanding*), apresiasi atau penghargaan (*appreciation*), dan tindakan konservasi lingkungan dan kebudayaan.
- ❖ *The Office of National Tourism of Australia* (dalam FAO, 1998) : sebagai turisme berbasis alam yang di dalamnya mengandung interpretasi terhadap lingkungan alam yang budaya dan pengelolaan sumberdaya alamnya secara ekologis bersifat lestari.
- ❖ PT. INDECON (1996) : sebagai penyelenggaraan kegiatan wisata yang bertanggung jawab di tempat-tempat alami dan/atau daerah-daerah yang dibuat berdasarkan kaidah-kaidah alam, yang mendukung upaya-upaya pelestarian lingkungan (alam dan kebudayaan) dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.
- ❖ Fandelli (2000) : Merupakan suatu perpaduan dari berbagai minat yang tumbuh dari keperihatinan lingkungan, ekonomi, dan sosial. Pada hakekatnya juga merupakan suatu bentuk wisata yang bertanggung jawab terhadap kelestarian areal, memberi manfaat secara ekonomi dan mempertahankan keutuhan budaya bagi masyarakat setempat.
- ❖ Santiago and Libosada (1994) : *Environmentally sound tourism sustainably implemented in a given ecosystem to yield equitable social and economic benefits and to enhance the conservation of natural and cultural resources.*
- ❖ DEPHUT (1988) : Kegiatan yang memanfaatkan potensi sumberdaya dan tata lingkungan yang masih bersifat alami atau belum banyak campur tangan manusia.

- ❖ Branidon (1996) : Kegiatan perusahaan wisata yang memberikan manfaat sebagai berikut: sebagai sumber pendanaan kawasan konservasi, pembenaran ekonomi dalam perlindungan kawasan konservasi, sebagai alternatif mata pencaharian masyarakat lokal untuk mengurangi pemanfaatan sumberdaya alam yang berlebihan, sebagai pilihan dalam mempromosikan konservasi, sebagai dorongan dalam upaya konservasi yang khusus.
- ❖ Hetzer (1995, dalam Fennel, 1999) : Merupakan konsep pariwisata yang di dalamnya terdapat prinsip-prinsip: meminimalisasi dampak negatif terhadap lingkungan, meminimalisasi dampak negatif dan meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat lokal, memberikan kontribusi terhadap kelestarian areal dan meningkatkan kepuasan terhadap alam dan budaya oleh turis.
- ❖ Western (1995) : Adalah hal tentang menciptakan dan memuaskan suatu keinginan akan alam, tentang mengeksploitasi potensi wisata untuk konservasi dan pembangunan dan tentang mencegah dampak negatifnya terhadap ekologi, kebudayaan dan keindahan.
- ❖ Smardon, R.C (1994) : Ekowisata sangat tergantung kualitas pengalaman wisatawan dalam berinteraksi dengan sumberdaya yang ada dan lingkungannya. *Dependent upon the quality of the experience of the observer with resource or the environment.* Hal ini sangat memerlukan informasi dan membutuhkan pengalaman alami yang berkualitas tinggi, dengan dampak yang sangat kecil hingga zero terhadap lingkungan.
- ❖ Hadinoto (1996) : merupakan bagian dari wisata alam yang dapat dilakukan di kawasan yang dilindungi seperti taman nasional, taman wisata alam, atau di kawasan yang tidak dilindungi seperti daerah pertanian dan desa wisata. Jadi ekowisata merupakan suatu perjalanan ke kawasan atau tempat yang masih alami, sehingga apabila wisatawan tersebut datang ke tempat wisata akan merasakan ketenangan dan kenyamanan.
- ❖ PP RI No. 18 Tahun 1994 tentang Perusahaan Pariwisata Alam di Zona TN, Tahura, TWA : Kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati gejala keunikan dan keindahan alam di Taman Nasional, Taman Hutan Rakyat dan Taman Wisata Alam.
- ❖ Hector Ceballos-Lascurain (1991) : Wisata yang mengandung perjalanan ke wilayah-wilayah alamiah yang belum terganggu dan terkontaminasi dengan tujuan khusus untuk studi, mengagumi dan menikmati keindahan alam dan berbagai flora dan fauna di dalamnya, serta berbagai bentuk budaya yang terdapat di wilayah itu.
- ❖ Epler wood (1996) : Perjalanan yang bertanggung jawab ke berbagai wilayah alami untuk mengkonservasi lingkungan dan menjaga keberlanjutan kesejahteraan masyarakatnya.
- ❖ Bornemeier, Victor and Durst (1997) : Perjalanan ke areal-areal alami yang bertujuan untuk memahami budaya dan sejarah dari suatu lingkungan, bertanggungjawab untuk tidak mencemari ekosistem, melainkan menciptakan peluang-peluang ekonomi untuk mewujudkan berbagai kegiatan konservasi yang bermanfaat dan menguntungkan bagi masyarakat lokal.
- ❖ Tourism Authority of Thailand (1995) : Suatu kunjungan ke suatu areal wisata tertentu dengan tujuan untuk studi, menikmati dan mengapresiasi pemandangan alam dan kondisi sosial serta gaya hidup masyarakatnya yang berlandaskan pada suatu pengetahuan dan tanggung jawab terhadap ekosistem dari wilayah tersebut.
- ❖ Healy (1988, dalam Nor and Wayakone, 1997) : Suatu kegiatan wisata yang secara langsung bergantung pada pemanfaatan sumberdaya alami pada suatu areal yang relatif belum terganggu, yang di dalamnya termasuk safari satwa liar, mengamati satwa liar, *canoeing, kayaking, trekking, hiking*, mengamati burung dan aktifitas lainnya.

Melihat berbagai definisi dan batasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pola pendefinisian adalah : (1) berorientasi pada tujuan yang ingin dicapai dari konsep yang ditawarkan, (2) berorientasi pada sumberdaya wisata yang digunakan, dan (3) berorientasi pada bentuk-bentuk kegiatan wisata yang diselenggarakan. Jika berbagai definisi tersebut diintegrasikan, maka sesungguhnya berbagai usaha untuk mencapai kematangan suatu ilmu pengetahuan, dalam hal ini *ecotourism*, dapat dikatakan hampir mencapai keberhasilannya. Namun, jika berbagai definisi tersebut dibiarkan "*solitare*" sebagaimana yang masih terjadi hingga saat ini, maka terdapat banyak hal mendasar yang secara objektif bersifat kontra produktif terhadap gagasan yang melatarbelakangi perkembangan ilmu itu sendiri.

Beberapa pemikiran berikut ini barangkali dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengevaluasi kesempurnaan berbagai definisi tersebut di atas, yaitu :

- ❖ Perlu disadari bahwa ada 5 tahap kegiatan yang tak terpisahkan dalam setiap perjalanan wisata yaitu: (1) tahap perencanaan, (2) tahap perjalanan menuju destinasi, (3) tahap kegiatan di destinasi, (4) tahap perjalanan pulang dari destinasi, dan (5) tahap rekoleksi. Setiap tahapan tersebut ikut menyumbang secara nyata atas tingkat kepuasan yang didapat oleh pelaku wisata; dimana berbagai studi menunjukkan bahwa kepuasan di destinasi hanya menyumbang maksimum sebesar 30 % atas kepuasan total. Dengan demikian maka pendefinisian suatu konsep *ecotourism* menjadi tidak sempurna jika hanya difokuskan pada areal destinasi.
- ❖ Pada dasarnya *sustainability concept* mensyaratkan setiap sektor pembangunan (termasuk *tourism*) untuk membangun dan memelihara *the 3 pillars of sustainability*, yaitu pilar ekologi, pilar sosial-budaya, dan pilar sosial-ekonomi. Sejalan dengan lima tahapan di atas, maka tentunya ketiga pilar tersebut haruslah juga dibangun dan dipelihara pada setiap kesatuan ruang yang digunakan untuk terselenggaranya setiap tahapan tersebut. Salah satu tuntutan logis dari hal ini adalah perlunya memasukkan konsep *regional-development* dalam mengintegrasikan kesatuan ruang tersebut. Dengan demikian, pendefinisian *ecotourism* yang hanya terfokus pada wilayah destinasi dapat dikatakan *unfair*. Dan, hal ini menjadi sangat penting pada era otonomi daerah, yaitu minimal dari sudut pandang: (1) keseimbangan sirkulasi fiskal, dan (2) keseimbangan beban tanggung jawab dan distribusi manfaat.
- ❖ Perlu diingat bahwa rentang aktivitas pariwisata (seperti diisyaratkan pada Gambar 11 dan Gambar 12 di atas) adalah sangat luas, dan *nature related tourism activities* (yang sering menjadi perhatian utama dalam berbagai konsep *ecotourism*) hanyalah salah satu bentuk pilihan kegiatan yang tersedia saja. Meskipun banyak ahli memprediksikan akan terjadi peningkatan berganda dalam permintaan *nature related tourism activities*, namun hingga saat ini porsi maksimum permintaan tersebut hanyalah mencapai sekitar 15 % saja dari total permintaan wisata yang ada. Lebih jauh, jika dikaitkan dengan *trend shifting* maka sesungguhnya secara alami akan selalu terdapat periode perubahan (*the period of change*; umumnya setiap 7 tahun sekali) yang juga sering diacu oleh sektor pariwisata. Dan, harus diakui bahwa sesungguhnya tidak ada satu perjalanan wisatapun yang bisa melepaskan diri dari *produk-modern* secara totalitas. Dengan demikian, maka pendefinisian *ecotourism* yang hanya berorientasi pada kealamiah sumberdaya dan lokasi dapat dikatakan *ambiguous* (jika tidak ingin dikatakan standar-ganda).

- ❖ Dari sudut pandang *tourism psychology*, hendaknya juga perlu diingat adanya pola perilaku memaksimalkan kepuasan oleh para turis. Berbagai hasil studi menunjukkan bahwa hal tersebut umumnya mereka capai dengan cara mengkonsumsi beragam jasa yang dapat mereka akses. Dengan demikian, pembatasan bentuk *tourism activities* dalam pendefinisian *ecotourism* yang umum diajukan banyak pihak saat ini dapat dikatakan "out of reality".

Setelah berbagai paparan pada bagian terdahulu, maka masih ada dua pertanyaan mendasar yang perlu untuk dijawab dan dicarikan solusinya, yaitu : (1) terminologi apa yang harus dipakai untuk mengintegrasikan kompleksitas pariwisata tersebut agar tanggung jawab politik lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan dan suatu "permintaan yang berdaya jual" tersebut secara bersamaan juga dapat dipenuhi, dan (2) pendekatan apa yang harus dipakai dalam mendefinisikan dan mewujudkan gagasan *sustainability* pada sektor pariwisata? Untuk menjawab pertanyaan tersebut barangkali Carter's Critic (1994; seperti yang telah dipaparkan pada bagian terdahulu) dapat digunakan sebagai kata kunci yang potensial.

Atas berbagai hal tersebut di atas, maka secara esensial gagasan *ecotourism* haruslah: (1) dipandang sebagai *principle* dan bahkan sebagai roh serta jiwa bagi apapun bentuk kepariwisataan, (2) bersifat implementatif dan tidak hanya bersifat retorika belaka, dan (3) haruslah diterima sebagai kewajiban dan tugas bagi semua pihak dalam sektor pariwisata. Jika ekoturisme dipandang sebagai *product*, maka akan terbuka peluang bagi setiap pihak untuk menciptakan produk yang berbeda; yang berkemungkinan bisa sangat bertolak belakang dengan gagasan yang diembankan dalam ekoturisme. Jika gagasan yang dicuatkan tidak implementatif, maka segala dinamika yang ada hanya akan sampai pada debat retorika belaka. Sedangkan jika ditempatkan sebagai *management option*, maka pasti akan terjadi dinamika "there is no single key can open all doors".

Salah satu pendekatan yang potensial untuk dipakai dalam menyederhanakan kompleksitas yang ada adalah "pendekatan ruang". Secara sederhana dapat dimengerti bahwa aktivitas apapun akan selalu membutuhkan/menempati ruang dan waktu tertentu secara spesifik, *vice versa*. Bagaimanapun juga, karakteristik suatu *aktifitas wisata* tentu akan berbeda dari suatu tempat ke tempat yang lain; meskipun tipe sumberdayanya tergolong sama. Jika pendekatan ini dapat diterima, maka proses penerapan *the 3 pillars of sustainability concept* pada suatu *tipe-ruang* juga bisa menjadi lebih fokus dan diterminologikan sesuai dengan *major characteristics of the space*. Sebagai contoh, istilah *eco-forest tourism*, *eco-agro tourism*, *eco-marine tourism*, *eco-coastal tourism*, *eco-rural tourism*, dan bahkan hingga *eco-urban tourism* akan sangat mudah menuntun setiap *stake holder* untuk mengkonsentrasikan dan memainkan perannya. Jika dikaitkan dengan konteks pengembangan keilmuan, maka pendekatan tersebut di atas juga diharapkan akan mampu menjadi gaya pendorong bagi kematangan bidang ilmu ekoturisme itu sendiri; baik dalam arti komprehensifitas lingkup keilmuan ataupun dalam segi spesialisasi keahlian.

Selanjutnya, meskipun pada dasarnya industri pariwisata adalah tergolong industri jasa, namun tidak bisa dielakkan bahwa dalam suatu industri pariwisata sesungguhnya juga ikut diproduksi berbagai barang yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar pariwisata tersebut (seperti berbagai makanan dan minuman) dan berbagai barang yang diperlukan untuk melengkapi kesempurnaan proses pariwisata (seperti cinderamata dan berbagai aksesoris kehidupan lainnya). Mempertimbangkan berbagai hal tersebut, maka ekoturisme sebaiknya didefinisikan sebagai : segala bentuk kegiatan dan tujuan wisata yang pelaksanaannya dapat menjamin tegaknya pilar ekologi, pilar sosial-budaya, pilar ekonomi, serta pilar edukasi, pilar pengalaman dan pilar kepuasan bagi pengunjung dan bagi semua *stakeholder* yang terlibat di semua ruang kejadian tempat terlaksananya 5 tahap proses perjalanan wisatawan maupun pada setiap ruang

produksi barang yang dipasokkan ke dalam sistem pariwisata tersebut. Tiga pilar pertama adalah merupakan representasi dari pentingnya konsep *sustainable development* pada setiap kegiatan wisata, sedangkan pilar pengalaman dan kepuasan adalah representasi dari kepentingan wisatawan. Adapun pilar pendidikan adalah merupakan proses transformasi obligasi bagi semua pihak untuk secara bersama berpartisipasi dalam mewujudkan kelima pilar lainnya melalui proses pendidikan.

Aspek Politik dan Kebijakan Ekowisata

Agenda 21 untuk *Travel and Tourism* secara jelas menyatakan bahwa dalam rangka untuk mencapai keberlanjutan maka kepariwisataan harus mendasarkan aktifitasnya pada *Rio Declaration on Environment and Development*. Beberapa hal penting yang tercantum dalam *Agenda 21 for Travel and Tourism* adalah sebagai berikut:

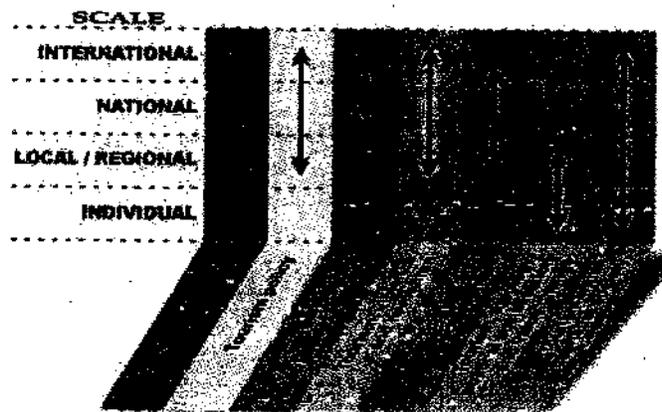
- ❖ Pariwisata hendaknya mendorong masyarakat untuk memajukan kehidupan yang sehat dan produktif serta hamonis dengan alam.
- ❖ Pariwisata hendaknya berkontribusi dalam konservasi, perlindungan dan restorasi dari ekosistem dunia.
- ❖ Pariwisata hendaknya didasarkan pada keberlanjutan produksi dan konsumsi.
- ❖ Bangsa-bangsa di dunia hendaknya berkolaborasi untuk mempromosikan suatu sistem ekonomi terbuka yang menjadikan terciptanya jasa pariwisata secara berkelanjutan.
- ❖ Proteksi perdagangan dalam pariwisata harus dilarang dan direvisi.
- ❖ Proteksi lingkungan hendaknya menjadi bagian yang terintegrasi dalam proses pembangunan pariwisata.
- ❖ Isu-isu kepariwisataan hendaknya ditangani dengan memperhatikan kepentingan masyarakat lokal, dimana keputusan perencanaan yang diambil hendaknya sesuai dengan kemampuan masyarakat lokal.
- ❖ Bangsa-bangsa di dunia sebaiknya saling mengingatkan satu sama lain tentang bencana alam yang dapat mempengaruhi kawasan-kawasan wisata.
- ❖ Pariwisata hendaknya menggunakan kapasitasnya untuk menciptakan lapangan kerja bagi wanita dan masyarakat lokal secara maksimal.
- ❖ Pariwisata hendaknya merekognisi dan mendukung identitas regional, budaya dan kepentingan masyarakat lokal.
- ❖ Hukum internasional tentang perlindungan lingkungan haruslah dihormati oleh setiap elemen dalam industri pariwisata.

Hall (1994) menyatakan bahwa untuk bisa mengerti pariwisata dan segala sesuatu dampak yang terkait dengannya maka proses pemahaman haruslah dilakukan hingga mencapai karakter politik yang secara inheren terdapat pada semua elemen yang terlibat dalam suatu sistem kepariwisataan. Pentingnya aspek politik tersebut sejalan dengan kenyataan yang menunjukkan bahwa secara alamiah pariwisata adalah bersifat multi-disiplin dan multi sektor; yang konsekuensinya berbagai konflik kepentingan pasti akan terjadi, sehingga menjadi penting untuk menemukan titik temu dari berbagai kepentingan yang berbeda.

Makna dari "politik" secara sederhana dapat mulai dilakukan dengan menelusuri berbagai pemaknaan yang tertulis di dalam berbagai kamus, yaitu umumnya didefinisikan sebagai "memutuskan suatu perkara secara bijak". Meskipun demikian, tidak mudah untuk memaknai apakah "politik" itu sesungguhnya. Lehmurch (1971; dalam Kevenhoerster 1997) menyatakan: "*Unter Politik wolen wir ein auf das Verhalten anderer bezognes zweckhaftes Handeln*

verstehen, das mit dem Ziel ausgeübt wird, gesellschaftliche Konflikte verbindlich zu regeln". Melalui politik suatu perilaku dalam berinteraksi untuk mencapai berbagai tujuan dapat dibentuk dan berbagai konflik kepentingan dapat diatur. Sementara itu Prittwitz (1994, p. 11) menyimpulkan politik sebagai : *"als Kunst, als Prozess der Selbstaufhebung des Staates, als Interessenkonflikt, als Regelungprozess im Verhältnis gesellschaftlicher Inputs und Outputs bzw; als kybernetischer Steuerungsprozess oder als emanzipativer Kommunikationsvorgang"*. Politik dimaknainya sebagai suatu seri dari proses pengambilan keputusan oleh pemerintah, dimana konflik kepentingan diatur dengan mempertimbangkan berbagai input dan output yang mungkin terjadi; termasuk di dalamnya berbagai saluran komunikasi yang diperlukan untuk merubah kebuntuan komunikasi menjadi kesempatan yang komunikatif dan emansipatif.

Dalam konteks pariwisata, Hall (1994, p. 18) mencoba menggambarkan dimensi politik seperti terlihat pada Gambar 13 (*Major Political Dimensions of Tourism*). Dari gambar tersebut dapat dipahami bahwa dimensi politik dari pariwisata adalah menyebar mulai dari tingkat individual hingga taraf komunitas internasional, yang melibatkan berbagai bentuk kepentingan dan *stakeholder*; yang dalam kenyataannya tentu lebih kompleks dari model yang digambarkan oleh Hall berikut ini.



Gambar 13. Dimensi Politik dalam Pariwisata (Hall, 1994)

Dalam konteks pembangunan pariwisata, pentingnya aspek politik pariwisata sangat erat kaitannya dengan berbagai kebijakan dan aturan yang diperlukan untuk mendukung berbagai implementasi dari pembangunan yang akan dilakukan. Dalam setiap pembangunan, bagaimanapun juga perlu didasarkan pada berbagai kebijakan yang dibutuhkan untuk memastikan berfungsinya setiap peran dari setiap *stakeholder* secara efisien dan efektif. Sejalan dengan kenyataan bahwa pariwisata bersifat multi-sektoral, maka peranan pemerintah (sebagai salah satu komponen politik) menjadi sangat penting. Persaingan antar daerah dalam berpartisipasi di bidang kepariwisataan dapat tergambar dalam pernyataan Hall (1994, p.21) yang berbunyi: *"The state is a powerful, resilient, pragmatic, and reflexive social structure capable of sustained purposefull action across many areas of social activity of which tourism is only one"*. Pemerintah adalah suatu struktur sosial yang bisa memainkan peran sebagai yang berkuasa, yang bertugas, yang melakukan dan yang menilai berbagai aktivitas sosial yang perlu disatukan ke dalam kepariwisataan.

Dalam konteks keterlibatan wilayah, maka Hall (1994, p.32; after IUTO, 1974 and Mill and Morrison, 1985) mengusulkan 7 bentuk keterlibatan sektor publik dalam pariwisata, yaitu: (1) koordinasi, (2) perencanaan, (3) legislasi dan regulasi, (4) entrepreneur, (5) stimulasi, (6) tatanan sosial sistem pariwisata dan (7) tatanan dasar perlindungan kepentingan

semua pihak. Hall (1994, p.25) juga mengingatkan bahwa aspek terpenting dalam mendiskusikan keterlibatan wilayah dalam politik pariwisata adalah kesetimbangan kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah regional.

Orum (1989, p.2) menyatakan bahwa esensi dari politik adalah "kekuasaan", sehingga setiap usaha untuk memecahkan misteri informasi politik harus bertujuan untuk menemukan aturan main yang dibutuhkan dalam setiap karakteristik proses distribusi kekuasaan dalam masyarakat. Mempertimbangkan pandangan Orum tersebut, maka sangat penting untuk mengenali berbagai komponen yang terlibat dalam setiap lingkup dinamika politik yang terjadi, memahami karakteristik dari setiap komponen dan untuk menelusuri proses munculnya berbagai ide dan gagasan serta kebijakan yang muncul sebagai akibat adanya kekuasaan spesifik secara alamiah. Selanjutnya, jika dikaitkan dengan model yang tertera pada Gambar 13 di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penelusuran dinamika politik pariwisata perlu dilakukan mulai dari tingkat individu (wisatawan) hingga ketingkat lebih besar berupa kelompok ataupun institusi-institusi yang terkait dalam sistem kepariwisataan.

Aspek Perencanaan Ekowisata

Aspek perencanaan sangat penting dalam sektor pariwisata. Hal ini bukan saja diakibatkan oleh karakteristik pariwisata yang bersifat multi sektor, melainkan juga karena sangat pentingnya aspek unik dalam menciptakan jasa dan produk wisata. Sejalan dengan karakter jasa-jasa dan produk wisata yang umumnya bersifat *immobility*, maka proses membangun dan mempertemukan berbagai kebutuhan yang terangkum dalam suatu permintaan dengan sumberdaya yang potensial untuk dijual sangat sulit dan mustahil untuk diwujudkan dengan efisien dan efektif serta berkelanjutan tanpa adanya suatu proses perencanaan yang baik. Meskipun pada dasarnya setiap wisatawan bertanggung jawab atas proses perencanaan yang harus dia lakukan dalam memutuskan pilihan perjalanan dan kegiatannya, tapi bagaimanapun juga pasti tidak satupun diantara mereka yang menginginkan terjadinya kesenjangan informasi yang mereka miliki dengan kenyataan yang mereka jumpai saat kunjungan aktual yang mereka lakukan. Di satu sisi, suatu kesalahan dalam mengelola sumberdaya wisata pasti akan menyebabkan kerugian finansial dalam banyak hal; yang setidaknya akan meningkatkan biaya pemasaran dan menurunkan tingkat keuntungan. Meskipun proses redesain berpeluang untuk selalu bisa dilakukan, namun hal tersebut tentunya akan selalu menyebabkan berbagai kerugian; baik dalam arti nilai investasi, waktu dan juga sumberdaya wisata itu sendiri.

Atas berbagai pengalaman empiris yang ada, WTO (1994, p.3) melaporkan bahwa manfaat dari suatu proses perencanaan yang baik adalah: (1) tersedianya manfaat jangka panjang tanpa menimbulkan resiko yang signifikan dan (2) mencegah masalah lingkungan dan sosial. Khusus untuk negara berkembang, WTO menekankan bahwa aspek perencanaan pariwisata menjadi sangat penting sejalan dengan rendahnya pengalaman yang mereka miliki dan terbatasnya aspek pembiayaan yang mereka miliki.

Secara sederhana, terminologi "perencanaan ekowisata" dapat dimaknai sebagai suatu usaha untuk mempertemukan "demand" dan "supply" melalui suatu pendekatan objektif yang dielaborasi melalui serangkaian sentuhan pengetahuan, seni, citra dan pengalaman yang berlandaskan argumen-argumen logis. Dalam konteks lingkup perencanaan, maka WTO (1994, p.3) menyatakan: "*First, tourism should be planned at the national level and regional levels. At these levels, planning is concerned with tourism development policies, structure plans,*

facility standards, institutional factors, and all other elements necessary to develop and manage tourism". Pariwisata harus direncanakan mulai dari tingkat nasional hingga tingkat regional. Pada setiap level yang ada, suatu perencanaan difokuskan pada kebijakan pembangunan, tatanan rencana-rencana yang akan dilakukan, standar fasilitas, faktor-faktor institusi dan berbagai elemen lain yang diperlukan untuk membangun dan mengelola pariwisata.

Banyak pendekatan yang bisa dipilih dalam perencanaan pariwisata, Gold (1980) diantaranya mengungkapkan adanya perencanaan yang dilakukan dengan pendekatan: (1) permintaan, (2) sumberdaya, (3) pemanfaatan ruang, and (4) perilaku. Dalam pendekatan-permintaan, acuan dan titik perhatian dari proses perencanaan adalah bentuk dan karakteristik dari permintaan itu sendiri; yang untuk kemudian dipikirkan bagaimana mengubah sumberdaya yang diperlukan untuk bisa dipasokan pada permintaan yang ada. Sementara itu yang menjadi fokus dan titik perhatian dari *pendekatan-sumberdaya* adalah ketersediaan dan karakteristik sumberdaya beserta atraksi dan aktifitas yang bisa didukungnya; untuk kemudian dipikirkan bagaimana menciptakan dan menumbuhkan permintaan atas sumberdaya yang bisa dipasokan tersebut. Adapun *pendekatan manfaat-ruang* adalah lebih banyak digunakan dalam proses pengembangan pembangunan yang berorientasi untuk mengoptimasi pemanfaatan ruang, sedangkan *pendekatan perilaku* yang didasarkan pada pola perilaku konsumsi suatu jasa dan produk wisata adalah sangat berguna untuk diterapkan dalam proses pengembangan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan efisiensi serta efektifitas pembangunan.

Sejalan dengan sifat pariwisata yang multi-sektoral, maka WTO (1994, p. 6) juga menggarisbawahi tentang pentingnya perencanaan terintegrasi dalam perencanaan pariwisata. Lebih jauh, tentunya juga perlu disadari bahwa kebutuhan akan perencanaan terpadu dalam pembangunan pariwisata adalah bukan hanya untuk mengoptimasi fungsi dan kinerja setiap elemen yang terkait dalam sektor pariwisata yang bersifat multi-sektor, melainkan juga adalah karena adanya kebutuhan untuk menyatukan pariwisata ke dalam kebijakan pembangunan secara keseluruhan. Melalui perencanaan terpadu, berbagai konflik akan dapat diminimalisir dan dieliminir, serta berbagai kegiatan pembangunan dapat diciptakan atau ditumbuhkan nilai tambahnya guna terciptanya agregat manfaat yang optimal dan maksimal.

Menurut WTO (1994, p. 12) proses perencanaan pariwisata dapat dituangkan dalam bentuk (1) *studi-awal*, (2) *penetapan tujuan*, (3) *survei pengumpulan data*, (4) *analisa dan sintesa*, (5) *kebijakan dan formulasi rencana*, (6) *rekomendasi*, dan (7) *implementasi dan monitoring*. Memperhatikan tahapan proses yang ditawarkan oleh WTO tersebut, maka - dimana proses "*penetapan tujuan*" diletakkan dalam tahap awal - dapat disimpulkan bahwa WTO berkecenderungan untuk menerapkan proses perencanaan yang bersifat *deductive approach*; yang barangkali akan sulit untuk bisa diterima oleh sekelompok perencana pada era 2000 yang cenderung memilih dan mengedepankan *inductive approach* yang umumnya dikenal dengan model *by process approach*. Mempertimbangkan kondisi pembangunan saat ini yang mementingkan proses *bottom up planning*, maka kiranya proses perencanaan yang ditawarkan oleh WTO tersebut perlu digubah dan diperkaya dalam pelaksanaannya.

Berkaitan dengan munculnya paradigma *sustainable tourism development*, Nelson (1999, p. 150) menggarisbawahi tentang pentingnya untuk melakukan *redefines* dari suatu kesuksesan dalam perencanaan pariwisata. Ditegaskan tentang pentingnya untuk mempertimbangkan dan mempromosikan gagasan tentang keuntungan finansial adalah bukan segalanya dan satu-satunya manfaat yang bisa didapat sektor swasta dalam suatu pembangunan sektor pariwisata. Meskipun gagasan Nelson tersebut terdengar janggal bagi sektor swasta yang selama ini selalu berorientasi pada keuntungan, tetapi ide dan gagasan dari Nelson tersebut sangat perlu untuk digunakan

dalam membangun dan mengembangkan inspirasi kreatif dalam proses perencanaan; khususnya dalam hal mengefisienkan proses dan mengefektifkan biaya, menciptakan dan memperbesar nilai tambah dari produk jasa yang dikembangkan serta dalam hal mengoptimasi pemanfaatan berbagai elemen sumberdaya yang ada maupun dalam hal menumbuhkan bentuk permintaan serta memacu peningkatan permintaan dari suatu produk yang dihasilkan.

Dalam konteks pengambilan keputusan dalam suatu proses perencanaan, Nelson (1999, p. 151) mengingatkan bahwa salah satu kesalahan yang umumnya dilakukan oleh *stakeholder* yang terlibat dalam suatu proses perencanaan adalah berupa "ketidaktahuan mereka tentang seperti apa sesungguhnya cara kerja proses perencanaan dan pengambilan keputusan tersebut sebaiknya". Atas hal ini, maka Avenzora (2003) mengingatkan kiranya perlu untuk disadari semua pihak bahwa ada perbedaan yang signifikan antara cara kerja yang dilakukan oleh kelompok praktisi, pemerintah dan kelompok akademisi. Secara general, dikatakan bahwa proses perencanaan yang dilakukan para akademisi (*wissenschaftliches plannung*) akan mengelaborasi berbagai tujuan melalui proses yang terstruktur, adapun pemerintah punya kecenderungan untuk melakukan perencanaan atas dasar kepentingan politik (*political approach*); sedangkan praktisi cenderung meletakkan prioritas mereka atas dasar intuisi bisnis yang mereka miliki (*leitsbild plannung*). Sedangkan Copper *et al.* (1998, p. 2), seperti terlihat pada Tabel 22, sangat serius untuk mengkritisi instusi bisnis pada praktisi dengan menyebutnya sebagai "*tourism myth*" (mitos pariwisata).

Table 22. Mitos Pariwisata dan Realita (Cooper *et al.*, 1998)

Mitos	Realita
Mayoritas wisata dunia adalah wisatawan internasional.	Wisatawan domestik adalah lebih mendominasi pariwisata dunia. Pariwisata domestik sesungguhnya menyumbang 80% dari perjalanan wisata dunia.
Mayoritas perjalanan wisata dunia adalah menggunakan jasa penerbangan dari satu negara ke negara lain	Mayoritas dari perjalanan adalah menggunakan transportasi darat
Pariwisata adalah hanyalah berkaitan dengan <i>leisure holidays</i>	Pariwisata adalah termasuk semua jenis perjalanan yang di dalamnya termasuk bisnis, konferensi dan pendidikan.
Lapangan pekerjaan dalam pariwisata diterjemahkan sebagai kesempatan terbatas dalam sektor <i>travel</i> dan alih bahasa (<i>guide</i>)	Lapangan pekerjaan terbesar di pariwisata sesungguhnya adalah pada sektor <i>hospitality</i> , bukan pada sektor <i>travel</i> .

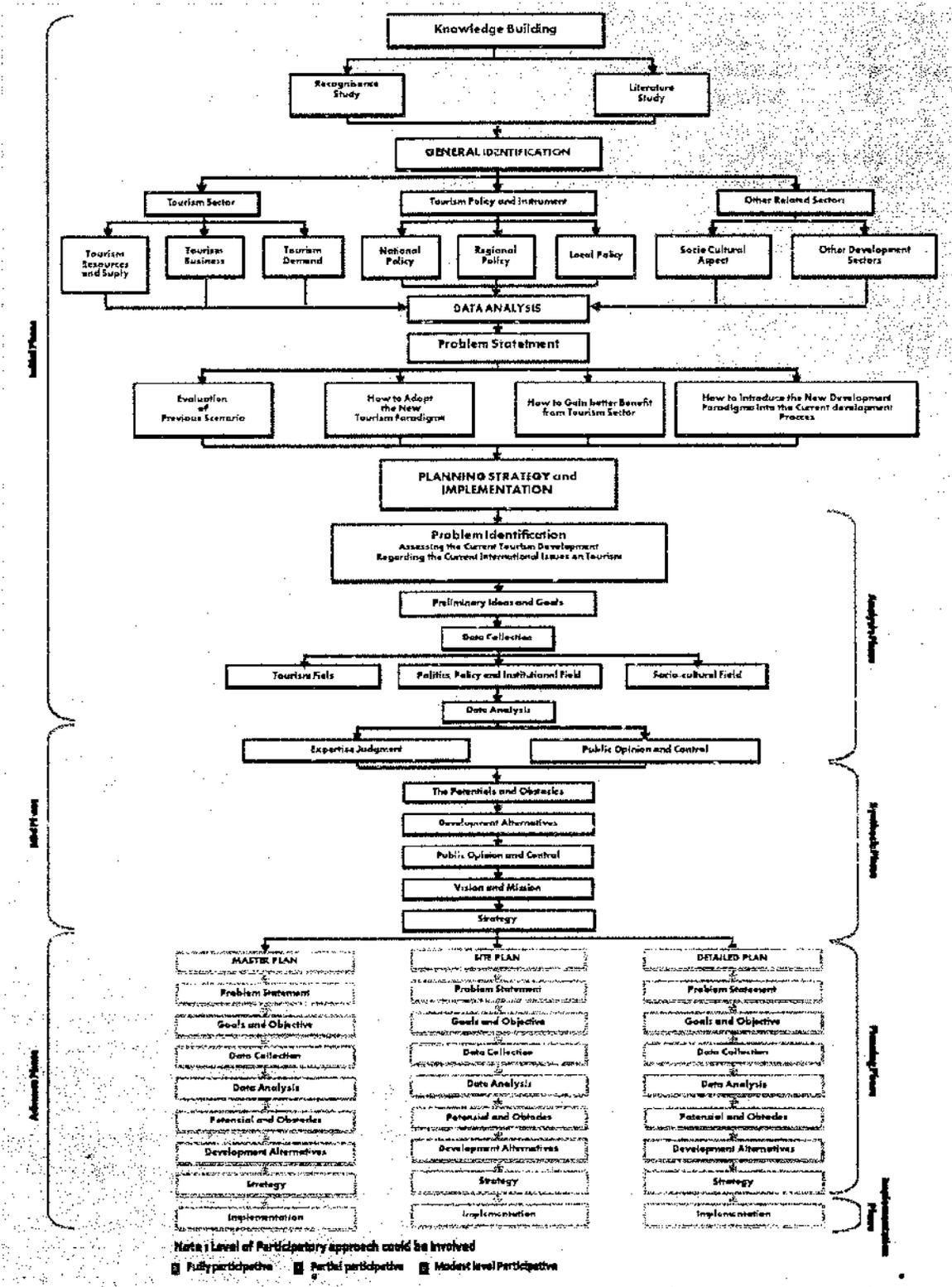
Mempertimbangkan berbagai dinamika paradigma kepariwisataan yang ada, maka Avenzora (2003) menawarkan model proses perencanaan terpadu (*integrated planning*) sebagaimana terlihat pada Gambar 14. Pada model tersebut, proses perencanaan setidaknya dibagi menjadi 5 fase, yaitu fase awal, fase analisa, fase sintesa dan fase perencanaan serta fase implementasi. Pada fase awal, proses perencanaan adalah ditujukan untuk membangun komprehensifitas pengetahuan dan pemahaman tentang subjek atau objek yang sedang direncanakan; untuk kemudian bisa menentukan esensi dari persoalan yang seterusnya bisa dielaborasi strategi dan pendekatan perencanaan yang akan dilakukan. Fase analisa diorientasikan untuk menelisik karakteristik dan pengaruh berbagai variabel yang telah diputuskan untuk dimasukkan dalam berbagai pertimbangan objektif dalam proses perencanaan yang dilakukan. Fase sintesa ditujukan untuk membangun atau mengelaborasi

berbagi kemungkinan pilihan rencana yang bisa dijadikan sebagai opsi dari bentuk rencana yang akan dihasilkan. Sedangkan dalam fase perencanaan, proses perencanaan yang dilakukan ditujukan untuk menghasilkan serangkaian tindakan yang diputuskan sebagai opsi terbaik dalam mewujudkan misi-misi perencanaan agar pencapaian visi yang telah ditetapkan bisa terwujud secara efisien dan efektif.

Aspek Kewilayahan

Sejalan dengan pemaknaan ekoturisme yang telah dipaparkan pada bagian terdahulu, maka aspek kewilayahan menjadi sangat penting untuk dipahami dalam memahami seluk beluk pembangunan dan kegiatan ekowisata. Secara sederhana, garis besar pewilayahan pembangunan kiranya dapat dibedakan antara kawasan perkotaan (*urban-area*) dan kawasan non perkotaan (*rural-area*). Jika di wilayah perkotaan persoalan mendasar yang harus dihadapi adalah berkaitan dengan persoalan-persoalan peningkatan kualitas lingkungan guna menunjang kualitas kehidupan, maka permasalahan yang harus dihadapi di *rural-area* adalah bagaimana mengawal proses pembangunan yang akan dilakukan sebaik mungkin agar tidak terjadi kerusakan ataupun penurunan kualitas lingkungan seperti yang telah banyak terjadi pada berbagai *rural-area* yang telah berubah menjadi *urban-area*. Lebih jauh, perlu disadari bahwa keutuhan berbagai potensi sumberdaya alam dan sosial budaya pada suatu *rural-area* adalah salah satu pertahanan terakhir dari suatu bangsa; kerusakan sumberdaya alam dalam lingkungan di *rural area* bukan hanya akan merugikan secara ekonomi, melainkan juga akan menghancurkan tatanan adat istiadat yang mengandung kekayaan *local capital* ataupun kearifan lokal lainnya.

Salah satu persoalan mendasar dalam pembangunan *rural-area* adalah bermula dari pendefinisian *rural-area* itu sendiri. Beberapa akademisi mendefinisikan *rural-area* sebagai lawan dari *urban-area*, sedangkan sebagian lainnya memaknainya dari sudut pandang sosiologi; sementara sebagian lainnya menggunakan label baru dengan terminologi *countryside*. BLUNDEN and NIGEL (1988, p.5) menulis: "...description such as unchanging, peasant, kinship, small communities, subsistence and so on might be at the rural end of this continuum, but words such as commercial, cosmopolitan, large, and quickly changing might be at the urban end." Perbedaan antara *rural-area* dan *urban area* lebih didikotomikan atas dasar karakteristik dinamika pembangunan yang terjadi pada setiap kawasan.



Gambar 14. Model Proses Perencanaan Terpadu (Avenzora, 2003)

Lebih jauh, komentar Clocke (1988, p.1) berikut ini kiranya dapat menolong untuk bisa memahami dinamika filosofi dari pembangunan di suatu *rural-area*: "*The ability of rural interests to attract attention in the political planning arena has therefore depended on the availability of highprofile political issues from which to develop wider mechanism of planning and policy making.*" Dijelaskan bahwa ada dua masalah mendasar di *rural area*. Hal yang pertama adalah berkaitan dengan ketidakseimbangan kekuatan ekonomi, politik dan status sosial, sedangkan hal yang kedua konsentrasi dalam dinamika menurunnya kuantitas dan kualitas dari berbagai pelayanan publik di *rural area*. Sedangkan, Sheperd (1998, p. 23) menulis: "*In very general terms rural development can be seen as the outcome of a history of struggle between the forces of expanding capitalism and rural populist or nationalist movement.*"

Persoalan pembangunan pada *rural-area* sesungguhnya sering terjadi pada semua aspek dengan segala bentuk dinamika problemnya. Sebagai contoh, aspek kemiskinan pada suatu *rural area* dapat disebabkan oleh rendahnya proses produksi, sedangkan di wilayah lain mungkin disebabkan oleh karena kelangkaan sumberdaya alam. Blunden and Nigel (1988, p. 6) menunjukkan bagaimana surplus makanan di UN telah menimbulkan anomali ekonomi dalam bentuk kenaikan harga makanan yang bersifat artifisial, sehingga kemudian mendorong direformasinya *rural policy* di UK pada tahun 1980-an. Insiden tersebut memberikan pelajaran bahwa kekeliruan dalam menciptakan efek ekonomi berganda di *rural area* malah menjadikan munculnya *domino effect* yang merugikan.

Banyak penulis yang mendefinisikan *rural development* adalah proses dari perubahan yang terjadi di suatu *rural area*, namun Parikh (1992, p. 48) menuliskan: "*Rural development does not take place by a mere process of making it non-urban. The word rural is not spatial alone but is to be viewed in a socio-cultural context. The word rural therefore is not a spatial qualification or adjective to the word development but is the very foundation of an alternative strategy of development.*" Pandangan Parikh tersebut mengingatkan bahwa suatu pembangunan bukanlah semata-mata identik dengan progres atau sedikit banyaknya investasi melainkan adalah berkaitan dengan kesediaan untuk melakukan suatu perubahan; baik yang bersifat horizontal maupun vertikal serta interaksi yang bersifat *konsentris*. Pandangannya tersebut juga mengandung gagasan dasar tentang pentingnya *community based development* dan *bottom up approach*.

Menurut Sheperd (1998, p.3-22), konsep keberlanjutan pada suatu *rural-area* adalah merupakan hasil dari sejumlah besar perubahan dari konsep-konsep konvensional pada tahun 1980, yaitu yang disebut modernisasi. Konsep konvensional telah bergeser menjadi Structural Adjustment Programmes (SAPs), sedangkan dalam proses yang terjadi konsep SAPs telah pula kehilangan akseptabilitas sejak terjadinya liberalisasi perdagangan dunia. Sedangkan saat ini konsep keberlanjutan pembangunan *rural-area* juga masih mencari-cari bentuk untuk bisa diimplementasikan secara baik. Sheperd menjelaskan bahwa beberapa pergeseran tujuan yang terjadi dalam pembangunan *rural area* diantaranya adalah mencakup: (1) *sustainable agriculture*, (2) *sustainable local institution*, (3) *revolutionising the project*, (4) *gender perspective*, and (5) *institutional implication*. Resume dari perubahan paradigma tersebut terlihat pada Tabel 23.

Dalam rangka mencari alternatif pembangunan di *rural-area*, sektor pariwisata telah menjadi pilihan yang paling populer di berbagai *rural-area* di Eropa. Verbole (1997, p.197) melaporkan bahwa sejak 1980-an pariwisata telah diposisikan sebagai aktifitas ekonomi yang paling menguntungkan dalam proses revitalisasi masyarakat-masyarakat di *rural-area* di Eropa Timur maupun di Eropa Tengah. Atas berbagai dinamika yang terjadi, Verbole juga mengingatkan bahwa selain manfaat ekonomi yang ada maka perhatian perlu juga diberikan terhadap dampak

yang mungkin terjadi; dimana untuk memahami dampak yang terjadi maka perhatian bukan hanya harus ditujukan atas dampak apa yang diciptakan yang kelompok wisatawan tertentu, melainkan juga harus dapat menentukan kelompok mana dalam masyarakat lokal yang paling banyak terkena dampak.

Tabel 23. Resume Pergeseran Paradigma Pembangunan Wilayah Pedesaan (Sheperd, 1998, p. 17)

Paradigma Lama	Paradigma Baru
Pertumbuhan ekonomi dengan segala risikonya.	Pertumbuhan kualitas: pengayaan lingkungan, kesesuaian dan akseptabilitas sosial, kontribusi untuk perdamaian.
Redistribusi, jika ada, adalah oleh pemerintah	Proses inklusifitas menggantikan pembatasan-pembatasan dalam pengambilan keputusan.
Adanya aturaturan dimaklumi sebagai resiko dari pertumbuhan.	Mengedepankan <i>intangible values</i> : kebebasan, otonomi dan <i>dignity</i>
Subsidi untuk pengusaha kecil disediakan oleh pemerintah.	Menciptakan atmosfer yang kondusif untuk tumbuhnya dunia usaha
Pemerintah menyediakan berbagai bentuk jaminan sosial.	Membangun institusi lokal untuk jaminan sosial.
Transfer teknologi dari negara kaya	Menghargai teknologi dan pengetahuan lokal, dalam wujud pembangunan teknologi partisipatif.
Transfer aset-aset berharga (seperti sumberdaya genetik) ke negara kaya	Lembaga perlindungan aset untuk masyarakat miskin.
Bersifat tangible, dimana valuasi ekonomi menjadi salah satu kunci penting dalam penentuan keputusan.	Pembangunan bersifat <i>multi face</i> dan berbagai hal lain yang bersifat <i>intangible</i> dimana proses penentuan lebih ditentukan oleh masyarakat.
Privatisasi ataupun nasionalisasi berbagai properti publik.	Menghargai properti publik sebagai modal bersama dan mengembangkan keindahan lingkungan sebagai tata nilai bersama.
Membangun organisasi-organisasi yang berkekuasaan besar untuk membangun; umumnya fokus pada pemerintah dan NGOs.	Menata institusi-institusi yang bersifat <i>polycentric</i> : organisasi-organisasi kemasyarakatan, tata kelola pemerintahan
Perencanaan adalah fokus proses berfikir	Evaluasi adalah fokus proses berfikir.
Membuat hirarki organisasi guna pelaksanaannya.	<i>Non-hierarchical learning organisation</i>
Membangun kompartemen-kompartemen	Holistik
Peranan pemerintah: produse utama, penyedia dan regulator regulator	Perananan pemerintah: menciptakan tatanan legal yang kondusif, membagi kekuasaan dan mendorong tumbuhnya asosiasi-asosiasi.

Pengalaman Keberhasilan Untuk Menjadi Contoh

NVV di Jepang. Pembangunan *National Vacation Villages* (NVV) di Jepang dapat dijadikan sebagai contoh yang baik tentang bagaimana merencanakan suatu pembangunan ekowisata. Model NVV tersebut telah berumur lebih dari 50 tahun dan terkenal secara global sebagai salah satu cerita kesuksesan pembangunan rekreasi masyarakat dan sekaligus program-program konservasi. Kusakabe (1992; dalam in Cebalos-Lescurian 1996, p. 245-246) melaporkan bahwa bahwa ada lebih dari 42 program NVV di Jepang, yang menjadi sangat terkenal sejalan dengan berbagai peluang dan fasilitas wisata alam yang mereka sediakan, serta berkontribusi sangat signifikan bagi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat lokal. Namun demikian, juga dilaporkan bahwa berbagai persoalan dan kesulitan finansial adalah tetap terjadi pada program tersebut pada masa 20 tahun pembangunan pertama.

CAMPFIRE di Zimbabwe. Sejak konsep pembangunan ekowisata mendapat perhatian global, maka konsep CAMPFIRE (*Communal Areas Management Programme for Indigenous Resources*) di Zimbabwe juga telah menjadi inspirasi banyak pihak dalam membangun model ekowisata. Program tersebut mempresentasikan berbagai usaha petani lokal dalam mengelola satwa liar dalam bentuk kegiatan ekonomi dan untuk menjamin keuntungan finansial melalui kegiatan *recreational hunting and non-consumptive hunting*. Heat (1992; dalam Cebalos-Lescurian 1996, p. 247-248) melaporkan bahwa model CAMPFIRE di Zimbabwe telah diakui sebagai salah satu

model yang baik dalam penatagunaan lahan-lahan marginal. Melalui program ini, jaringan hotel konvensional telah difasilitasi dan diberdayakan untuk terlibat dalam suatu kesepakatan usaha bersama dengan institusi pemerintah lokal (*district*) untuk memanfaatkan populasi satwa liar melalui berbagai kegiatan rekreasi alam; termasuk *non-consumptive hunting*.

Leader di Spanyol. Program *Leader La Sierra* (Spanyol) - didirikan oleh *European Regional Development Fund* - adalah contoh keberhasilan lain yang patut untuk diikuti dalam menjadikan ekoturisme sebagai model untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat lokal. Program *Leader* adalah sama sekali tidak membangun suatu proyek pembangunan, melainkan hanya menyediakan model pembangunan ekonomi lokal melalui pemberdayaan masyarakat lokal ataupun asosiasi usaha untuk memulai aktivitas usaha mereka sendiri dan usaha kecil melalui fasilitas pendanaan modal kerja dan jasa konsultasi. Menurut *Commission of the European Community* (1990; dalam Nitsch and Straaten, 1995, p. 172-173) program ini pada dasarnya bertujuan untuk: (1) diversifikasi dan spesialisasi produk pertanian, (2) produksi hijau menuju perlindungan alam, (3) fasilitas finansial (4) pendidikan dalam semua sektor ekonomi, dan (5) perbaikan infrastruktur.

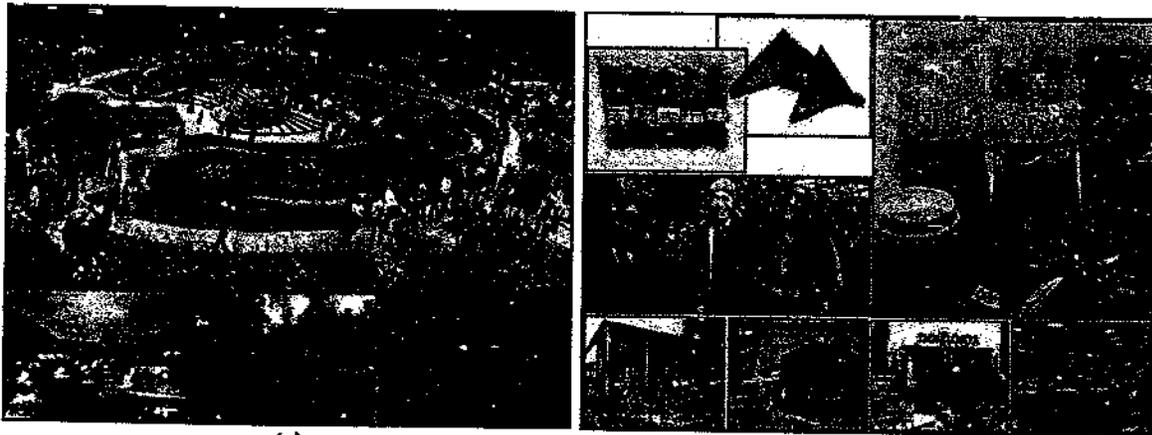
Bergwald Project di Alpen. *Bergwald Project* yang dipromosikan sejak 1987 oleh Greenpeace dan WWF Switzerland juga salah satu contoh keberhasilan lain yang sangat inspiratif untuk diikuti. Proyek ini tidak hanya menawarkan berbagai program interpretasi alam dan pendidikan lingkungan, melainkan juga memotivasi para wisatawan di Pegunungan Alpen untuk secara aktif berpartisipasi dalam melakukan berbagai kegiatan konservasi yang terukur. Meskipun kegiatan tersebut diselenggarakan dalam model *year to year basis*, tetapi mereka tetap menyediakan program-program permanen seperti perlindungan salju, perlindungan banjir, perlindungan runtuh batu, dan beberapa perlindungan satwa liar (Anonymous, 1994 p.1-8)

ACAP di Nepal. Contoh lain yang tergolong pionir dan berhasil adalah *Annapurna Conservation Area Project* (ACAP) di Nepal. Proyek ini adalah digagas oleh King Mahendra Trust for Conservation in 1986. Gurung and Coursey (1994, p. 177-194) melaporkan bahwa prinsip utama dari program ACAP adalah keberlanjutan partisipasi masyarakat lokal, fasilitasi dan konservasi. Pelaksanaan proyek dilakukan dengan metoda "akar-rumput", konsep multi-guna dan implementasi program bertahap.

Doi-Tung Project di Thailand. Keberhasilan pembangunan *Doi-Tung Project* di Utara Thailand dapat dikatakan sebagai salah satu bukti penting bahwa ekoturisme memang dapat dijadikan sebagai model untuk pembangunan yang efisien, efektif dan memberikan manfaat ekonomi yang berlipat ganda bagi banyak pihak serta positif bagi lingkungan serta sosial budaya secara bersamaan di suatu kawasan *rural area* ataupun kawasan hutan. Hanya dalam waktu 3 dekade, proyek dari Raja Thailand ini telah menunjukkan ke seluruh dunia bahwa suatu rencana yang strategis dan kebijakan yang konsisten mampu merubah hutan dan ladang opium menjadi suatu kawasan destinasi wisata (lihat Gambar 15a) yang menghasilkan manfaat ekonomi yang berlipat ganda serta menguntungkan banyak pihak; termasuk bagi para mantan buruh tani opium maupun bagi para panglima-panglima mafia opium. Saat ini *Doi-Tung Project* telah mampu menghasilkan laba usaha lebih dari 500 juta Bath, mempekerjakan lebih dari 3000 orang dan semua keuntungan yang di dapat sepenuhnya digunakan untuk *Doi-Tung Social Program*; dimana bantuan dana dari pemerintah terus turun jumlahnya dari 29 juta Bath/tahun.

Di wilayah ini, ladang-ladang opium dan lahan terlantar bekas perang opium telah mereka ubah menjadi tegakan hutan macadamia yang menghasilkan *Macadamia Nut* yang mahal harganya. Kebun kopi rakyat telah mereka fasilitasi untuk menghasilkan biji kopi terbaik dan diolah untuk menghasilkan bubuk kopi (*Doi-Tung Coffee*) yang beraroma dan rasa sangat baik; serta kemudian dijual dalam kemasan yang didesain sangat baik dan bahkan disalurkan secara eksklusif melalui Doi-Tung Café yang sudah mulai tersebar ke seluruh Thailand (lihat Gambar 15b). Tegakan hutan terus mereka bina lengkap dengan berbagai tindakan pencegahan erosi yang dibangun secara permanen dan baik serta fungsional untuk kegiatan wisata. Sementara itu kegiatan hutan kemasyarakatan terus mereka bangun dengan mengoptimasi pemanfaatan dan menciptakan nilai tambah (*added value*) berbagai hasil hutan non kayu; seperti jamur, anggrek, ulat sutra, madu, tanaman langka, getah karet dan rebung. Lebih lanjut, kegiatan hutan kemasyarakatan bukan saja mereka lakukan dalam bentuk menyalurkan berbagai hasil panen dalam suatu sistem pemasaran produk yang sangat jenius, melainkan juga mereka lengkapi dengan berbagai program penelitian yang bertujuan untuk propagasi ataupun pemuliaan. Kayu-kayu hasil pembinaan hutan (hasil penjarangan tegakan hutan maupun hasil peremajaan tegakan Makadamia) bukan saja mereka jual untuk digunakan bagi kebutuhan kelangsungan proyek melainkan juga telah mereka produksi menjadi berbagai bentuk meubel yang dipadukan dengan rotan yang dihasilkan dari hutan-hutan di kawasan ini.

Para mantan buruh opium yang bekerja pada proyek telah dibina dalam suatu perkampungan yang lengkap dengan infrastruktur dasar yang sangat memadai (rumah, air bersih, listrik, televisi dan telepon) dan fasilitas umum yang modern (rumah sakit, *community center* dan sekolah dasar hingga sekolah menengah atas). Kebudayaan masyarakat lokal bukan hanya dibina untuk terus tumbuh guna melengkapi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat mereka, melainkan juga mereka beri nilai tambah sebagai atraksi kebudayaan yang bisa dinikmati para wisatawan sepanjang tahun, ataupun digubah untuk ditampilkan dalam bentuk cinderamata yang berkualitas tinggi. Semua itu dikerjakan oleh masyarakat lokal di bawah binaan Manajemen *Doi-Tung Project* yang sangat ramping, namun professional.



(a) (b)
Gambar 15 (a) Kawasan Destinasi Wisata Doi-Tung; (b) Doi-Tung Coffee

Keberhasilan projek ini bukan saja telah menunjukkan manfaat yang luar biasa dalam konteks sosial-ekonomi regional, melainkan juga telah memberikan peranan yang besar dalam menyelesaikan persoalan pelanggaran tata batas negara oleh masyarakat Doi-Chang-Ko di Myanmar yang berbatasan langsung dengan Wilayah Doi-Tung. Projek Doi-Tung telah mendapatkan dispensasi dari Pemerintah Thailand untuk bisa mempekerjakan para pelintas batas dari Negara Myanmar; baik dalam bentuk pelintas batas harian (*daily commuter*) ataupun dalam bentuk pelintas batas "menetap-terbatas". Para pelintas batas dari Myanmar telah diberi identitas khusus untuk bisa bekerja di projek dengan segala hak kesehariannya secara terbatas hanya pada wilayah Doi-Tung; dimana untuk keluar dari wilayah Doi-Tung maka mereka diharuskan memenuhi kewajiban imigrasi reguler yang berlaku secara umum di Thailand. Kebijakan ini bukan hanya telah membantu masyarakat miskin di wilayah Myanmar yang berbatasan dengan Doi-Tung, melainkan juga telah menjadikan terjalinnya komunikasi sosial budaya yang positif dan bermanfaat bagi kedua belah pihak.

Cerita Kegagalan Untuk Pembelajaran

Di satu sisi, tidak bisa ditolak bahwa Bali telah menjadi banyak impian daerah otonomi lain dalam konteks pembangunan pariwisata. Sepintas, semua pihak menganggap bahwa perlu diikuti dan semua daerah otonomi ingin jadi terkenal seperti Bali. Namun demikian, di sisi lain sesungguhnya ada banyak hal yang terjadi yang bertentangan dengan pandangan umum yang sepintas tersebut. Sejalan dengan kondisi Bali saat ini, secara objektif harus dikatakan bahwa Bali telah menjadi sangat sulit untuk diintroduksi dan direkayasa guna bisa menyesuaikan diri dengan konsep keberlanjutan; dan dapat pula dikatakan bahwa sesungguhnya Bali telah "tersiksa" oleh pertumbuhan yang sangat cepat dan khaotis serta berorientasi keuntungan semata seperti selama ini. Bali yang pada awal pertumbuhannya sebagai destinasi wisata dikenal sebagai kawasan yang sangat alami dan kaya akan keunikan budaya, saat ini harus dikatakan telah berubah wujud menjadi kawasan wisata masal yang menyeluruh dan penuh dengan dampak negatif.

Untuk menunjukkan beberapa aspek penting dari dinamika yang terjadi di Bali, maka beberapa laporan berikut kiranya bisa dijadikan sebagai bahan berfikir, yaitu :

- ❖ Sudibya (Bali Post 10 Juni, 1997) melaporkan bahwa proporsi sektor pertanian dalam PDRE Bali telah bergeser dari sebagai sektor primer menjadi sektor tertier; yang sebagian besar adalah disebabkan oleh tekanan sektor pariwisata. Sektor pariwisata telah menjadi 71 % dari PDRB Bali, sehingga tidak ada keraguan bahwa sektor pariwisata telah berperanan besar dalam ekonomi Bali. Hal ini bukan saja telah menjadikan tergesernya posisi sektor pertanian, melainkan juga telah menimbulkan kerugian pada sektor pertanian, yaitu berupa berkurangnya sumberdaya air bagi pertanian (Harian NUSA 5 Januari 1999).
- ❖ Bali Post (6 Oktober, 1997) melaporkan bahwa pembangunan pariwisata di pantai Lovina (Buleleng) telah kelebihan pasok akomodasi dari berbagai jenis. Hal ini adalah disebabkan oleh kesalahan penatagunaan lahan dan juga telah meenyebabkan abrasi yang sangat serius di sepanjang pantai.
- ❖ Pitana (Bali Post, 10 Oktober 1998) mengkritisi bahwa hubungan dan interaksi antara sektor pariwisata dan *Lembaga Adat* di Bali adalah sangat buruk. Secara teoritis, eksistensi budaya lokal adalah dijaga oleh Lembaga Adat dan juga menjadi salah satu atraksi utama di Bali, tetapi dalam kenyataannya pariwisata tidak memberikan perhatian atas berbagai dukungan yang mereka butuhkan. Hampir tidak ada uang-pariwisata yang sampai pada Lembaga Adat untuk bisa menjaga budaya Bali secara berkelanjutan, dan berbagai pembangunan wisata di Bali telah mengancam kelestarian Desa Adat dalam berbagai aspek.

- ❖ Sukardika *et al.* (1998, dalam Bali Post, 22 December 1998) menggarisbawahi bahwa tekanan terbesar pada perencanaan tataguna lahan di Bali juga disebabkan oleh regulasi sektor pariwisata yang tidak konsisten. Kelompok elit dari Jakarta telah menekan pemerintah lokal untuk menerima migrasi modal dari Jakarta ke Bali untuk mempertahankan berbagai jasa pariwisata.
- ❖ Bali Post (23 December, 1998) memprediksikan bahwa pariwisata Bali sedang menuju kehancuran. Responden mereka mengindikasikan beberapa hal penting yang akan menyebabkan hancurnya pariwisata di Bali, yaitu: (1) kompetisi negatif diantara usaha wisata dalam mendapatkan wisatawan, (2) berhentinya beberapa perusahaan penerbangan Eropa untuk melayani jasa penerbangan ke Bali dan (3) terjadinya penurunan lama tinggal wisatawan (*tourist's length of stay*). Penyebabnya adalah kerusakan lingkungan dan *over-crowded atmosphere* yang ditimbulkan oleh kesalahan perencanaan pembangunan pariwisata. Sedangkan artikel lain melaporkan, bahwa kesalahan mendasar yang telah dilakukan pemerintah Bali adalah membiarkan dan mengizinkan terjadinya perubahan fungsi lahan-lahan subur di sekitar Pure untuk dibangun berbagai infrastruktur dan fasilitas jasa wisata.
- ❖ The Nusa (23 Dec., 1998) melaporkan pariwisata telah mengabaikan prinsip Catur *Purusa Artha* yang menjadi tata nilai dasar bagi kehidupan Masyarakat Bali, yang kemudian menimbulkan berbagai hal yang bersifat destruktif untuk keberlanjutan adat dan budaya serta alam di Bali. Sosiologi Bali, Prof. Dr. I.G.N. Bagus (dalam Harian Nusa 29 December, 1998) menyatakan bahwa tata nilai, norma dan karakter Masyarakat Bali telah tertransformasi secara sangat revolusioner karena adanya pembangunan wisata. Masih dalam artikel yang sama, seorang seniman terkenal dari Bali, Nyoman Nuarta, mengkritisi pembangunan pariwisata di Bali secara tajam dengan mempersepsikan bahwa pariwisata Bali telah merampok hak masyarakat Bali untuk menunjukkan adat dan budaya mereka yang sesungguhnya. Sedangkan Ketua Asosiasi PIIRI di Bali (pada artikel yang sama) menginformasikan bahwa partisipasi masyarakat Bali dalam berbagai pasokan untuk usaha Hotel dan Restoran di Bali hanyalah 8 % saja.
- ❖ Kritik tajam lainnya juga telah disampaikan oleh I.G. MUDANA di BALI POST (13 Maret 1999), yaitu: "...sesungguhnya kami membutuhkan pariwisata untuk Bali, bukan Bali untuk pariwisata. Sangat menyedihkan bahwa kenyataannya menunjukkan bahwa pariwisata di Bali telah menjadi "wisata buaya" dibandingkan yang seharusnya adalah wisata-budaya. Dan, di kampung mereka sendiri masyarakat Bali telah menjadi seperti orang idiot ketika mereka melihat berbagai kejanggalan praktek budaya Bali dalam pariwisata Bali.
- ❖ Meskipun di satu sisi berbagai kritik di atas (yang sepertinya dilontarkan sebagai manifestasi suatu kemarahan oleh berbagai praktisi dan pemerhati) akan dianggap sebagai suatu evaluasi yang mungkin digolongkan pihak tertentu sebagai evaluasi yang bersifat quasi atau sinisme subjektif, tetapi di sisi lain berbagai kritik tersebut tidak dapat diabaikan bahkan setidaknya harus dijadikan sebagai indikator bahwa telah terjadi sesuatu dampak yang sangat serius.

Dalam konteks global, banyak pihak juga telah melancarkan banyak kritik terhadap berbagai dampak negatif dari pembangunan pariwisata yang salah arah, yaitu:

- ❖ Boniface and Fowler (1993, p. 19) menyatakan bahwa dalam banyak hal pariwisata adalah bagian dari *neo-colonialism*. Juga dikemukannya pandangan Rudyard Kipling (seorang sastrawan terkenal dari Inggris) yang mengkritik fenomena pemikiran Dunia Barat terhadap Dunia Timur, yaitu: "*Asia is not going to be civilized after the methods of the West. There is too much Asia and she is too old*".
- ❖ Mieczkowski (1995, p.160-163) menggarisbawahi ada empat aktor yang menyebabkan dampak negatif pariwisata terhadap lingkungan, yaitu para developer, pemerintah pada semua level, industri pariwisata, dan wisatawan itu sendiri. Dituliskan bahwa meskipun pusat perhatian umumnya adalah pada aliansi (antara *developer* dengan pemerintah) bersifat nepotisme yang masih terus berlangsung di negara berkembang, tetapi sesungguhnya aliansi tiga pihak antara developer, pemerintah dan pengusaha industri pariwisata adalah lebih berbahaya dan lebih sering terjadi; sedangkan para wisatawan sendiri juga menjadi agen dampak yang dinamikanya sering tidak terprediksi, dimana pada banyak kejadian untuk dampak yang bersifat temporal sekalipun sesungguhnya adalah sering terabaikan pengaruh pentingnya terhadap kerusakan lingkungan.
- ❖ Murphy (1985, p. 131) mengingatkan tentang teori akulturasi bahwa dalam proses akulturasi "pihak yang lemah" adalah akan selalu didominasi oleh "pihak yang lebih kuat"; dimana pihak yang lemah hanya akan mendapatkan "*mirror image*" belaka. Atas hal ini, maka dapat disimpulkan bahwa tanpa perlindungan budaya maka kelompok masyarakat yang berpendidikan dan berpendapatan rendah akan berkecenderungan kehilangan tata nilai budaya asli mereka, dimana pada tahap berikutnya akan menurunkan *touristic-values* dari budaya itu sendiri.

Alier (1996) melaporkan bahwa kesalahan dalam orientasi perencanaan ekologi di Barcelona adalah karena penatagunaan lahan. Pantai-pantai yang indah di Barcelona memang telah dibangun, tetapi proses pembangunannya telah menjadikan berubahnya keunikan dan keharmonisan kota tua ke bentuk kota modern yang dipenuhi oleh jaringan jalan, menghilangkan *green belt* yang dulu berfungsi sebagai *agroforestry* dan pengelolaan sumberdaya air yang terkonsentrasi untuk memenuhi kebutuhan pariwisata ternyata telah menurunkan persediaan air untuk keseluruhan wilayah dan merugikan penduduk. Berbagai hal tersebut di atas adalah mengingatkan tentang betapa pentingnya kehati-hatian dalam mendorong suatu *rural-area* menjadi *urban-area*. Cepat atau lambat suatu *rural-area* pasti akan berubah menjadi *urban-area*, atau setidaknya-tidaknya pasti akan berasosiasi dengan *urban-area* disekitarnya, sehingga proses pembangunan *rural area* melalui berbagai konsep dan program ekoturisme (yang saat ini masih cenderung hanya diorientasikan ke berbagai bentuk *rural-area*) adalah tidak bisa dilakukan secara sambil lalu; melainkan harus dengan suatu kesungguhan perencanaan yang terukur.

Ekoturisme Di Kawasan Hutan di Indonesia

Sejarah kegiatan rekreasi di areal hutan di Indonesia sesungguhnya dapat dikatakan telah dimulai sejak ratusan tahun yang lalu bersamaan dengan berkembangnya kegiatan dan budaya berburu pada berbagai kelompok masyarakat di Indonesia. Kegiatan berburu yang telah membudaya pada berbagai kelompok masyarakat di Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Maluku

dan Jawa sejak dahulu, bukan hanya bertujuan untuk membasmi hama babi yang sering merugikan pertanian mereka, melainkan juga telah ditujukan sebagai kegiatan rekreasi berkelompok diantara populasi laki-laki dewasa. Kegiatan berburu juga telah dijadikan oleh masyarakat lokal sebagai bagian dari "monitoring wilayah" dan sebagai bagian dari pembinaan hutan melalui pengumpulan benih dan bibit tanaman tertentu yang secara kultural mereka perlukan (seperti pengumpulan bibit Surian bagi Masyarakat Minangkabau). Melalui kegiatan berburu, kaum lelaki di Minangkabau tidak saja hanya memenuhi kebutuhan rekreasi mereka, tetapi juga melakukan pengawasan terhadap kawasan tanah-tanah adat yang menjadi tanggungjawab mereka serta melakukan pembinaan hutan adat melalui monitoring, penyakit dan peremajaan tegakan hutan.

Sejalan dengan penunjukan berbagai kawasan konservasi di Indonesia pada awal 80-an, maka sesungguhnya Indonesia juga dapat dikatakan telah mempunyai antusiasme dan motivasi yang tinggi untuk memanfaatkan potensi rekreasi di berbagai kawasan hutan di Indonesia. Saat ini, hampir seluruh propinsi telah memiliki taman nasional yang ratusan ribu hektar luasnya dan juga dilengkapi berbagai bentuk kawasan konservasi lain yang juga mempunyai potensi ekowisata di dalamnya. Pada Tabel 24 terlihat jumlah kawasan konservasi yang ada di Indonesia saat ini, sedangkan pada Tabel 25 terlihat distribusinya.

Tabel 24. Jumlah Kawasan Konservasi di Indonesia

NO	Kawasan Konservasi Alam	Jumlah	Luas (Ha)
1.	Cagar Alam		
	a. Darat	243	4.333.630
	b. Laut	5	152.610
2.	Suaka Margasatwa		
	a. Darat	73	5.052.973
	b. Laut	2	5.220
3.	Taman Nasional		
	a. Darat	43	12.284.031
	b. Laut	7	4.043.541
4.	Taman Wisata Alam		
	a. Darat	104	258.469
	b. Laut	17	491.284
5.	Taman Hutan Raya	21	344.174
6.	Taman Buru	14	225.103
	Total Amount of Area		
	a. Terrestrial	452	22.498.383
	b. Ocean	39	4.692.655

Source: calculated from www.dephut.go.id

Tabel 25. Distribusi Kawasan Konservasi di Indonesia

No	Propinsi	Taman Wisata Alam		Taman Nasional		Taman Hutan Raya	
		Jumlah	Luas	Jumlah	Luas	Jumlah	Luas
1.	NAD	2	231,400	1	1,094,692	1	6,300
2.	North Sumatra	5	3,071	1	108,000	1	51,600
3.	West Sumatra	4	40,509	1	190,500	1	12,100
4.	Riau	2	6,778	1	144,223	1	6,172
5.	Kep. Riau	NA	NA	NA	NA	NA	NA
6.	Jambi	1	425	4	1,651,286	1	15,830
7.	Bengkulu	3	15,877	NA	NA	1	1,122
8.	South Sumatra	1	50	1	202,896	NA	NA
9.	Bangka Belitung	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Tabel 25. (lanjutan)

No	Province	Recreational Nature Parks		National Parks		Provincial Parks	
		Amount	Area	Amount	Area	Amount	Area
10.	Lampung	NA	NA	2	490,621	1	22,245
11.	DKI Jakarta	1	99	1	107,489	NA	NA
12.	Banten	NA	NA	1	123,156	NA	NA
13.	West Jawa	18	4,971	3	143,553	3	632
14.	Central Jawa	5	270	3	123,760	1	231
15.	DI. Yogyakarta	2	4	NA	NA	1	617
16.	East Jawa	3	20	4	176,696	1	27,828
17.	Bali	3	15,566	1	9,003	1	1,392
18.	West Nusa Tenggara	9	13,428	1	41,330	1	3,155
19.	East Nusa Tenggara	8	102,647	4	314,054	1	1,900
20.	West Kalimantan	2	835	4	1,203,090	NA	NA
21.	Central Kalimantan	3	2,054	2	983,740	NA	NA
22.	South Kalimantan	2	2,135	NA	NA	1	112,000
23.	East Kalimantan	2	61,930	2	1,559,129	1	61,850
24.	North Sulawesi	3	3,196	2	367,720	NA	NA
25.	Gorontalo	NA	NA	NA	NA	NA	NA
26.	Central Sulawesi	5	92,738	2	580,596	1	7,128
27.	South Sulawesi	11	152,870	2	574,515	1	3,475
28.	Southeast Sulawesi	4	163,500	2	1,495,194	1	7,877
29.	West Sulawesi	NA	NA	NA	NA	NA	NA
30.	Maluku	5	5,085	2	356,300	NA	NA
31.	Papua	7	197,323	3	4,317,310	NA	NA
Total		111	1,616,936	50	16,215,444	21	343,454

Source: Calculated from The Ministry of Forestry 2010.

Dalam konteks sumberdaya, maka tidak ada keraguan tentang betapa kayanya potensi sumberdaya ekowisata di kawasan hutan di Indonesia; baik dalam aspek jumlah, kualitas dan penyebaran sumberdaya serta jaraknya dari pusat populasi terkait. Pada kondisi sentuhan manajemen yang masih tergolong relatif sangat rendah, Avenzora dan Sunarminto (2011) melaporkan bahwa skor potensi sumberdaya ekowisata di berbagai kawasan konservasi di Indonesia adalah tergolong tinggi; yang berarti masih sangat terbuka peluang untuk menjadikannya mempunyai skor yang jauh lebih tinggi lagi melalui sentuhan manajemen yang baik dan benar (lihat Tabel 26). Walaupun demikian, nampaknya harus dikatakan bahwa berbagai potensi yang sangat besar tersebut belumlah menemukan jalan untuk bisa memberikan berbagai dampak positif yang seharusnya bisa berlipat ganda bagi banyak pihak. Hingga saat ini, jumlah kunjungan wisatawan ke berbagai kawasan rekreasi di Indonesia umumnya hanyalah baru mencapai 0.03 persen dari jumlah populasi terdekat dari wilayah kawasan konservasi tersebut (lihat Tabel 27). Hal ini berarti dari sisi *demand* pun sesungguhnya masih sangat besar peluang untuk ditumbuhkan menjadi berlipat-lipat kali dari jumlah kunjungan yang telah ada saat ini.

Tabel 26. Skor Potensi Ekowisata Pada Kawasan Konservasi di Indonesia

Kawasan Konservasi	Kriteria Evaluasi						
	A	B	C	D	E	F	G
1. Cagar Alam	4	4	4,5	4,5	4	6	4
2. Suaka Margasatwa	4	4	5	4	4	6	4
3. Taman Nasional	6,5	6	6	6	5,5	5,5	3,5
4. Taman Wisata Alam	5,5	5,5	4	6	4,5	4,5	6
5. Taman Hutan Raya	5,5	5,5	4,5	6,5	4,5	5	6,5
6. Taman Buru	5	4,5	4,5	4,5	5	6	4

Catatan: A. Keindahan; B. Keunikan; C. Kelangkaan; D. Seasonalitas; E. Fungsi Sosial; F. Sensitivitas; G. Aksesibilitas. Dinilai dengan menggunakan metoda Avenzora (2008) yang menerapkan kriteria kualitatif yang dilengkapi dengan indikator terstruktur guna penerapan Skala Likert.

Memperhatikan skor pada Tabel 26 di atas, nampaknya bisa disimpulkan bahwa rendahnya permintaan aktual ekowisata di berbagai kawasan konservasi yang ada di Indonesia saat ini adalah bukan karena pengaruh kualitas dari pengalaman *in-situ* kegiatan rekreasi pada kawasan tersebut melainkan diduga kuat adalah karena elemen eksternal sumberdaya ekoturisme di wilayah sekitar kawasan konservasi. Dugaan ini adalah sejalan dengan teori yang telah menjelaskan bahwa kepuasan kegiatan wisata adalah merupakan agregat dari kelima fase perjalanan yang dilakukan wisatawan (fase perencanaan, perjalanan menuju lokasi, pengalaman *in-situ*, perjalanan pulang dari lokasi dan fase rekoleksi); dimana Avenzora (1997) menemukan bahwa kualitas pengalaman *in-situ* di Taman Nasional Gede Pangrango (sebagai salah satu contoh model pengelolaan taman nasional terbaik saat ini di Indonesia) ternyata hanya menyumbang sebesar 19,3 % dalam total kepuasan rekreasi para responden di TN Gede Pangrango yang berwisata ke Kawasan Wisata Bopunjur (Bogor-Puncak-Cianjur).

Tabel 27. Jumlah Pengunjung Ekowisata Pada Kawasan Konservasi di Indonesia Pada Tahun 2010

No	Propinsi	Jumlah Pengunjung	Jumlah Populasi	Rasio (%)
1	Nangroe Aceh Darussalam	923	4,494,410	0.021
2	North Sumatera	477	12,982,204	0.004
3	West Sumatera	8	4,846,909	0.001
4	Riau	136	5,538,367	0.003
5	Riau Island	NA	3,092,265	NA
6	Jambi	4799	7,450,394	0.064
7	South Sumatera	113391	1,715,518	6.609
8	Bangka Belitung	NA	7,608,405	NA
9	Bengkulu	699	1,223,296	0.057
10	Lampung	37725	1,679,163	2.247
11	Banten	4356	9,607,787	0.045
12	DKI Jakarta	981	43,053,732	0.003
13	West Java	1059453	32,382,657	3.272
14	Central Java	73452	3,457,491	2.124
15	Yogyakarta	64490	37,476,757	0.172
16	East Jawa	162476	10,632,166	1.528
17	Bali	35729	3,890,757	0.918
18	NTB	12023	4,500,212	0.267
19	NTT	44982	4,683,827	0.960
20	West Kalimantan	432	4,395,983	0.009

Tabel 27. Lanjutan

No	Propinsi	Jumlah Pengunjung	Jumlah Populasi	Rasio (%)
21	Central Kalimantan	10194	2,212,089	0.461
22	South Kalimantan	1384	3,626,616	0.038
23	East Kalimantan	574	3,553,143	0.016
24	North Sulawesi	10288	2,270,596	0.453
25	Gorontalo	NA	2,635,009	NA
26	Central Sulawesi	4524	8,034,776	0.056
27	West Sulawesi	NA	2,232,586	NA
28	South Sulawesi	714485	1,040,164	68.689
29	Southeast Sulawesi	1761	1,158,651	0.152
30	Maluku	226	1,533,506	0.015
31	North Maluku	NA	1,038,087	0
32	West Papua	77	760,422	0.010
33	Papua	6961	2,833,381	0.247

Note: 1. The number of visitor is an aggregate number of domestic and foreign tourist.

2. Calculated from The Ministry of Forestry 2010.

Kendala Mendasar

Masih rendahnya permintaan aktual kunjungan wisata di berbagai kawasan konservasi yang telah dipaparkan di atas sesungguhnya bukanlah hanya merupakan "rapor buruk" bagi sektor kehutanan semata, melainkan juga adalah menjadi wakil kondisi pencapaian kinerja sektor pariwisata nasional. Meskipun pada tahun 2010 Pemerintah Indonesia telah mengklaim keberhasilan pencapaian jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia pada angka 7 juta wisatawan, namun sesungguhnya angka tersebut adalah bisa menjadi sangat tidak berarti dibandingkan dengan ketersediaan sumberdaya wisata yang dimiliki Indonesia. Setidaknya, pada tahun 2010 Indonesia telah gagal menjadi negara yang terbaik dalam mendapatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dibandingkan dengan pencapaian Malaysia (24, 6 juta wisatawan manca negara), Singapore (9.2 juta wisatawan), Thailand (15.6 juta wisatawan) dan pencapaian China yang sangat spektakuler yaitu 55.7 juta wisatawan mancanegara.

Secara umum, masih sangat rendahnya kinerja pencapaian-pencapaian pariwisata di Indonesia adalah disebabkan oleh beberapa dinamika mendasar yang bersifat reciprokal berikut, yaitu;

- ❖ Rendahnya kapasitas SDM Kepariwisata di Indonesia yang sangat erat kaitannya dengan sejarah pendidikan kepariwisataan Indonesia; yang untuk jangka waktu puluhan tahun hanya terfokus pada aspek hospitalitas dan manajemen perjalanan serta aspek ekonomi wisata saja, itu pun sebagian besar adalah dalam bentuk pendidikan vokasional dengan jenjang Diploma-3. Pola pendidikan yang demikian ini telah menjadikan SDM Kepariwisata di Indonesia mempunyai kemampuan yang baik dalam hal keterampilan tetapi tidak mempunyai kemampuan yang memadai dalam kebutuhan kognitif yang kompleks dan strategis untuk menata sektor pariwisata yang bersifat multi disiplin dan multi sektoral. Meskipun dalam 1-2 dekade belakangan ini telah semakin banyak diselenggarakan studi tentang pariwisata untuk jenjang S1 ataupun Pascasarjana, tetapi umumnya hanya dalam konteks ekonomi wisata.

- ❖ Rendahnya kapasitas SDM juga telah menyebabkan buruknya politik dan kebijakan pariwisata pada semua jenjang, baik untuk lingkup regional, nasional maupun internasional. Hal ini tidak saja menyebabkan visi, misi dan orientasi pembangunan pariwisata Indonesia menjadi tidak terencana secara strategis melainkan juga telah menyebabkan lahirnya kebijakan-kebijakan setengah hati, *trial and error* dan diskontinyu dalam berbagai aspek; termasuk pendanaan.
- ❖ Orientasi pembangunan yang tidak strategis telah melahirkan dinamika pembangunan dan usaha wisata yang *compang-camping*, biaya tinggi dan penuh dengan fenomena *copying the success story* yang melahirkan kompetisi negatif dalam banyak hal. Ijin usaha dan investasi pariwisata masih belum mampu didebirokratisasi dan dideregulasi menjadi pelayanan publik yang bersifat *one stop services*, sehingga menjadi mahal dan tidak efisien serta membelenggu tingkat partisipasi masyarakat luas.
- ❖ Orientasi pembangunan yang tidak strategis juga telah melahirkan dinamika pembangunan pariwisata yang lebih berorientasi pada *vocal point development* daripada *regional development*. Hal ini tidak saja telah menyebabkan tidak optimalnya manfaat hasil pembangunan yang dilakukan melainkan juga telah menyebabkan rusak dan turunnya nilai potensi sumberdaya wisata yang ada pada berbagai *vocal point* yang telah dibangun.
- ❖ Orientasi pembangunan pada *vocal point* telah menyebabkan relatif tertinggalnya infrastruktur dan fasilitas pendukung wisata di sekitar *vocal point*; dimana hal ini menyebabkan rendahnya permintaan aktual yang didapat. Sedangkan rendahnya permintaan aktual menimbulkan dampak finansial dan ekonomi usaha. Hal ini diperburuk oleh kondisi riil pendapatan per kapita masyarakat Indonesia yang masih tergolong rendah dan belum merata; sehingga di satu sisi siklus usaha wisata menjadi lebih panjang dari kondisi ideal dan di sisi lain kebutuhan re-investasi menjadi lebih tinggi atau produk jasa yang dimiliki akan menjadi *old fashion* dan kalah dalam persaingan dengan produk jasa wisata yang baru tumbuh kemudian.

Penutup

Secara teoritis, tidak ada keraguan tentang tingginya manfaat ekoturisme bagi pembangunan suatu negara, namun demikian perlu suatu kesadaran mendasar semua pihak untuk bisa mewujudkannya menjadi suatu kegiatan pembangunan yang memberikan manfaat yang berganda secara ekonomi, sosial-budaya dan lingkungan. Untuk itu, maka beberapa hal mendasar yang perlu untuk disadari bersama adalah sebagai berikut:

- ❖ Ekoturisme adalah memang bersifat multi-disiplin yang membutuhkan dukungan pengetahuan banyak bidang keilmuan. Banyak bidang keahlian dibutuhkan untuk bisa meramu dan mengelaborasi suatu konsep pemikiran dalam pembangunan ekoturisme, namun tentunya perlu disadari bahwa penguasaan suatu bidang keahlian yang dibutuhkan dalam bidang ekoturisme adalah tidak serta merta menjadikan seseorang bisa mengklaim dirinya sebagai ahli ekoturisme. Keahlian ekoturisme yang berakar pada bidang keilmuan *leisure science* sesungguhnya adalah sama tuanya dengan berbagai keahlian bidang keilmuan eksakta dan sosial lainnya; atau bahkan lebih tua. Berbagai pengalaman telah menunjukkan bahwa intervensi yang berlebihan suatu bidang keilmuan tertentu atau keakuan seorang ahli bidang tertentu ke dalam bidang keilmuan ekoturisme ternyata hanya menjadi penyebab munculnya kerancuan pengetahuan dan penyebab gagalnya proses implementasi pembangunan.

- ❖ Sejalan dengan karakteristik dan filosofi akar keilmuan yang dimilikinya (baik dalam aspek *leisure science* maupun dalam aspek *ecological science* yang mencuatkan terminologi ekoturisme) maka ekoturisme tidaklah boleh hanya didefinisikan dan dimaknai terbatas pada *natural dan untouched area* seperti tertulis pada berbagai literatur yang banyak beredar di Indonesia saat ini; melainkan harus dimaknai sebagai segala bentuk kegiatan, jasa dan tempat wisata yang pembangunannya dan pelaksanaannya berkewajiban untuk memperhatikan dan menjamin tegaknya pilar ekologi, sosial-budaya dan ekonomi secara berkelanjutan serta tegaknya pilar pengalaman, pilar kepuasan dan pilar edukasi. Atas hal ini, orientasi pembangunan ekoturisme haruslah tidak hanya sebatas *vocal point* yang menjadi titik konsentrasi kegiatan utama, melainkan harus dituangkan dalam bentuk pembangunan suatu kesatuan wilayah secara utuh.
- ❖ Pembangunan ekoturisme tergolong pembangunan yang bersifat jangka menengah dan jangka panjang, sehingga suatu pembangunan ekoturisme yang akan dilakukan perlu direncanakan secara komprehensif, baik dan benar serta memperhatikan kaidah-kaidah manajemen strategis. Untuk itu, maka visi dan misi pembangunan ekoturisme setidaknya perlu direntangkan minimal hingga 50 tahun ke depan dari waktu perencanaan yang dilakukan.
- ❖ Selain membutuhkan perencanaan yang baik, benar dan strategis, maka keberhasilan implementasi pembangunan ekoturisme adalah sangat ditentukan oleh konsistensi politik dan kebijakan publik; baik dalam bentuk berbagai regulasi yang terkait maupun dalam bentuk kontinuitas dukungan pendanaan. Ketidakkonsistenan kebijakan publik dan berbagai regulasi yang dihasilkannya tidak hanya akan menjadikan pembangunan ekoturisme kehilangan daya saingnya melainkan juga akan menyebabkan pemborosan biaya serta kerugian atas berbagai biaya pembangunan yang telah dikeluarkan sebelumnya serta akan merusak sumberdaya alam itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Kathleen M. 1995. Making-up Toraja ? *The Appropriation of Tourism, Anthropology, and Museum for Politics in Upland Sulawesi, Indonesia*. ISSN 0014-1828.
- Allen, L. R., Marry A.D., and Donald, S. W. 1983. The Stability of Leisure Factor Structures Across Time. *Leisure Science* Vol. 6. (2), pp. 221-237.
- Alier, J. M. 1996. The Failure of Ecological Planning in Barcelona. *CNS : a Journal of Socialist Ecology*. Vol. 7 (2), June 1996. pp. 113 -123
- Anko, B. 1992. Modern Forestry and Sustainable Tourism - Some Common Traits. In Baine, J. et. al. 1992. *Educating For Sustainable Tourism. Proceeding of the International Conference Helds In Slovenia, Sept. 17-24, 1992*. IUCN.
- Anonimous. 1994. *Bergwald-projekt*. Impressum. Chur.
- Anonimous. 1995. Himpunan Peraturan Perundangan yang Berkaitan dengan Tata Ruang / Tata Guna Tanah (The Bundle of the Regulations for Space Use Pattern and Land-use). Publikasi No.25 A. Direktorat Jenderal Penatagunaan Tanah Kantor Menteri Negara Agraria / Badan Pertanahan Nasional. Jakarta.
- Anonimous. 1996. Rencana Pembangunan Kepariwisataaan Tanah Toraja. 1996-2001 (Tourism Development Plan of Tanah Toraja 1996-2001). Pemerintah Daerah Kabupaten Dati II Tana Toraja.
- Ambaras, David R. 1998. Social Knowledge, Cultural Capital, and the New Middle Class in Japan, 1895-1912. *Journal of Japanese Studies*. Vol 24 (1), p. 1-33.
- Avenzora, R. 1995. Ekoturisme: suatu overview terhadap konsep (Ecotourism: an overview of the concepts). *Media Konservasi*. Vol. 6 (4) June 1995.

- Avenzora, R. 1997. Ecotourism - strategy for mountainous national parks - In Indonesia. Magister Thesis. Faculty of Forestry and Ecology, Georg-August University. Göttingen.
- Baines, John et al. (eds.). 1992. Educating for Sustainable Tourism. Proceeding of the International Conference, Slovenia. Univ. Ljubljana.
- Bailey, S-A., R. Heines-Young, and C. Watkins. 1995. Ancient Woodland in England and Wales. In Griffiths, G.H (ed.) 1995. Landscape Ecology : Theory and Application. *Proceeding of the fourth annual IALE Conference, held at the University of Reading, 19-20 September 1995.* IALE-UK.
- Bender, B. 1996. Landscape and Anthropology. In *Aalean (ed.)*. 1996. *Landscape study and management*. Boole Press. Dublin. 93-101.
- Bender, B. 1993. Landscape- meaning and action. In *B. Bender (ed.)*, *Landscape : Politics and Perspectives*. Oxford, 1-17.
- Binns, Tony., Trevor Hill, and Etienne Nel. 1997. Learning from the People: Participatory rural appraisal, geography and rural development in the 'new' South Africa. *Applied Geography*. Vol. 17 (1), p. 1-9.
- Blackford, M. G. 2001. *Fragile Paradise : The Impact of Tourism on Maui*. University Press of Kansas. Kansas.
- Blunden, J. and Nigel Curry. 1988. *A Future for Country Side*. Basil Blackwell Ltd. London.
- Boniface, B.G. and Chris Cooper. 2001. *Worldwide Destination (3rd eds): The Geography of Travel and Tourism*. Butterworth-Heinemann. Oxford..
- Boniface, Pricilla and Peter J. Fowler. 1993. *Heritage and Tourism in 'the Global Village'*. Routledge. London.
- Boo, Elizabeth. 1992. Ecotourism Diagnostic and Planning Guidelines for Protected Areas Managers. A presented paper at the IV World Congress on National Parks Protected Areas. Caracas, Venezuela.
- Bruns, D. 1996. Landscape Study for Planning. In *Aalean (ed.)*. 1996. *Landscape study and management*. Boole Press. Dublin. 151-157.
- Buhalis, D. and J. Fletcher. 1995. Environmental Impacts on Tourist Destinations : An Economic Analysis. In Coccossis, H. and Peter Nijkamp (eds.). 1995. *Sustainable Tourism Development*. Avebury. Singapore.
- Burns, P. M. 1999. *An Introduction to Tourism and Anthropology*. Routledge. London.
- Canestrelli, E. and Paolo Costa. 1991. Tourist Carrying Capacity: A Fuzzy Approach. *Annals of Tourism Research*, Vol. 18, p. 295-311.
- Carr, Michael. 1987. *Patterns Process and Change in Human Geography*. Macmillan Education Ltd. London.
- Cater, E. and Gwen Lowman, (eds.). 1994. *Ecotourism : a sustainable option?*. Wiley. England.
- Catterji, M., and Yang Kaizhong (eds.) . 1997. *Regional Science in Developing Countries*. Macmillan Press Ltd. London.
- Cebalos-Lescurian, Héctors (ed.). 1996. *Tourism, Ecotourism and Protected Areas*. IUCN. Switzerland.
- Cerovsky, J. 1992. Tourism, Environment and Education - A global View. In Baine, J. et. al. 1992. *Educating For Sustainable Tourism*. Proceeding of the International Conference Helds In Slovenia, Sept. 17-24, 1992. IUCN.
- Clawson, M and Knetsch, L. Jack; 1966; *Economics of Outdoor Recreation; Resources for the Future Inc.; Washington DC*
- Cloke, P (ed.). 1988. *Policies and Plan for Rural People: An International Perspective*. Unwin Hyman. London.
- Coates, B.J., K. D. Bishop. 1997. *Panduan Lapangan Burung-burung di Kawasan Wallacea: Sulawesi, Maluku da Nusa Tenggara*. SMK Desa Putra. Jakarta.
- Cobhan Resource Consultan. 1997. *National Programme of Landscape Assessment : Banff and Buchan*. Scottish Natural Heritage Publication Section. UK.
- Coccossis, Hany and Peter Nijkamp. 1995. *Sustainable Tourism Development*. Avebury. Singapore.
- Coleman, J. 1988. Social capital in the creation of human capital. *American Journal of Sociology*, 94 (Suppl.). p. 95-120.
- Cooper et. al. 1999. *Tourism (Principles and Practice)*. Addison Wesley Longman Publishing. New York
- Conti, S. and Paolo Giaccaria. 2001. *Local Development and Competitiveness*. Kluwer Academic Publishers. London.
- Crowe, S., and Mary Mitchell. 1988. *The Pattern of Landscape*. Packard Publication Ltd. Chichester.
- Dale, V. H. at al. 1998. *Assessing Land-Use Impacts on Natural Resources*. *Environmental Management Vol 22 (2)*, p. 203-211.
- Daily, G.C., and Paul R. Ehrlich. 1996. *Socioeconomic Equity, Sustainability, and Earth's carrying Capacity. Ecological Applications*, Vol. 6(4). p. 991-1001.
- Darvill, T. 1996. European Heritage and the Recognition of Cultural Landscape Areas. In *Aalean (ed.)*. 1996. *Landscape study and management*. Boole Press. Dublin. 173-181.
- Eckbo, G. et al. 1998. *People In A Landscapc*. Prentice Hall. New Jersey.
- Ellenberg, L. , Marion Schloz, and Birgit Beier. 1997. *Ökotourismus : Reisen zwischen Ökonomie und Ökologie*. Spektrum Akademischer Verlag. Berlin.
- Elsner, Gary and Smardon, Richard (1979) *Our National Landscape*. Berkeley University, California.
- Eyles, John; 1985; *Sense of Place*; Silverbrook Press.; U.K
- Farina, A. 1998. *Principles and Methods in Landscape Ecology*. Chapman & Hall. London.
- Fagence, M. 1998. *Rural and Village Tourism in Developing Countries*. *The Third World Planning Review Vol. 20 (1)*. p. 107-118.
- Faulkner, B., Gianna Moscardo and Eric Laws (ed.) 2001. *Tourism in the 21st Century: Lessons from Experience*. Continuum. London and New York.
- Finn, M., Martin Elliot-White, and Mike Walton. 2000. *Tourism and Leisure Research Methods: data collection, analysis, and interpretation*. Longman. Harlow.
- Forestry Commission. 1994. *Forest Landscape Design*. HMSO. London.

- Glancy, Maureen and Sandra L. Little. 1995. Studying the Social Aspects of Leisure: Development of the Multiple-Method Field Investigation Model (MMFI). *Journal of Leisure Research*. Vol. 27 (4), p. 305-325.
- Gold, S.M. 1980. *Recreation Planning and Design*. McGraw Hill Book Co. New York.
- Golley, F. B. and Juan Bellot. (eds.) 1999. *Rural Planning from an Environmental System Perspective*. Springer. Berlin.
- Grayfe, A.R., Jerry F. Vaske, and Fred R. Kuss. 1984. Social Carrying Capacity: An Integration and Synthesis of Twenty Years Research. *Leisure Science*, Vol. 6 (4), p. 395-431.
- Green, B. 1996. Landscape Conservation or Landscape Preservation?. In: *Aaleun (ed.) 1996. Landscape study and management*. Boole Press. Dublin. 161-172.
- Grimwade, Keith. 1988. *Discover Human Geography*. Hodder and Stoughton. London.
- Goldstone, P. 2001. *Making the World Safe for Tourism*. Yale University Press. New haven and London.
- Gurung, Chandra P. and Maureen De Coursey. 1995. The Annapurna Conservation Area Project: a pioneering example of sustainable tourism?. In: *Cater, Erlet and Gwen Lowman. 1995. Ecotourism: a sustainable options?* John Wiley & Sons. London.
- Hall, Colin Michael. 1994. *Tourism and Politics: Policy, Power and Place*. John Wiley & Sons. London.
- Harrison, Lynn C. and Wisnton Husbands (eds.) 1996. *Practicing Responsible Tourism: International case study in tourism planning, policy, and development*. John Wiley & Sons Co. Singapore.
- Hill, W.F. 1995. *Landscape Handbook for the Tropics*. Garden Art Press. UK.
- Holloway, J. Christopher. 1985. *The Business of Tourism*. MacDonald and Evans.
- Health and Safety Executive. 1989. *Risk Criteria for Land Use Planning in the Vicinity of Major Industrial Hazards*. Her Majesty's Stationary Office. London.
- Hernandez, A. 1986. The Little Germany: Deutsche & Mallorca. *Revue d. iberischen Halbinsel*. ISSN 09030-0724. p. 52-53.
- IUCN. 1990. *From Strategy to Action : the IUCN Response to the Report of the World Commission on Environment and Development*. IUCN. Switzerland.
- Jackson, E. L. 1983. Activity-Specific Barriers to Recreation Participation. *Leisure Science* Vol 6 (1). pp. 47 - 60
- Jagtenberg, Tom and David McKie. 1997. *Eco-impacts and the Greening of Postmodernity : New Maps for Communication Studies, Cultural Studies, and Sociology*. SAGE Publications. London.
- Jason, Tan (reviewer). 1999. Values in Education: Social Capital Formation in Asia. *International Journal of Educational Development*. Vol. 19, p. 102-104.
- Jeffries, D. 2001. *Government and Tourism*. Butterworth-Heinemann. Oxford.
- Kevenhörster, Paul. 1994. *Politik-Wissenschaft: Entscheidungen und Strukturen der Politik*. LESKE+BUDRICH. Opladen.
- Kozlowski, J. and G. Hill. 1993. *Towards Planning for Sustainable Development: A guide for the Ultimate Environmental Threshold (UET) Method*. Avebury. Singapore.
- Kreps, G.M. et al. 1997. The Impact of Tourism on the Amish Subculture: A case Study. *Community Development Journal* Vol. 32 (4). p. 354-367.
- LAWAS, Eric. 1995. *Tourist Destination Management: Issues, Analysis and Policies*. Routledge. London.
- Lehmbruch, G. 1971. *Einführung in die Politikwissenschaft*. Kohlhammer. Stuttgart.
- Lier, H.N. and P.D. Taylor (eds.) 1993. *New Challenges in Recreation and Tourism Planning*. Elsevier Science Publisher B.V. Amsterdam.
- Lindberg, K., Stephen McCool, and George Stankey. 1997. Rethinking Carrying Capacity. *Annals of Tourism Research*, Vol. 19, p. 461-464.
- Lindberg, Krieg and Donald E. Hawkins (eds.). 1993. *Ecotourism : A Guide for Planners and Managers*. The Ecotourism Society. North Bennington, Vermont.
- Lowyck, E., Luk Van Langenhove, and Livin Bollaert. Typologies of Tourist Role, in Johnson, Peter, and Barry Thomas (eds.) 1993. *Choice and Demand in Tourism*. Mansel Publishing Ltd. England.
- MacFarlane, R. 1995. Environmental "actors" and Land-use Modelling. In Griffiths, G.H (ed.) 1995. *Landscape Ecology : Theory and Application. Proceeding of the fourth annual IALE Conference, held at the University of Reading, 19-20 September 1995*. IALE-UK.
- Mansperger, M.C. 1995. Tourism and Cultural Change in Small-Scale Societies. *Human Organisation* Vol. 54 (1). p. 87-94
- Marsh, W.M. 1998. *Landscape Planning - Environmental Application*. John Wiley & Sons, Inc. New York.
- Mathieson, A., and Geoffrey Wall. 1982. *Tourism Economic, physical and social impacts*. Longman. London.
- McCool, S. F. ,and R. Neil Moisey. 2001. *Tourism, Recreation and Sustainability : Linking Culture and the Environment*. CABI Publishing. Wallingford-UK.
- Meethan, K. 2001. *Tourism in Global Society: Place, Culture, Consumption*. Palgrave. Malaysia.
- Mieczkowski, Zbigniew. 1995. *Environmental Issues of Tourism and Recreation*. Univ. Press of America Inc. London.
- Milles, C.W.N. and W. Seabrooke. 1977. *Recreational Land Management*. E & F.N. Spon Ltd. London.
- Montgomery, J. D (ed.). 1997. *Values in Education : Social Capital Formation in Asia and the Pacific*. Hollis Publishing Co. New Hampshire.
- Moore, A. B. and Rusty Brooks. 1996. *Transforming Your Community: Empowering for Change*. Krieger Publishing Co. Malabar-Florida.
- Moore, K., Grant Cushman, and David Simmons. 1995. Behavioural Conceptualisation of Tourism and Leisure. *Annals of Tourism*, Vol. 22 (1), p. 67-85.
- Morkham, Bronwyn, and Russel Staiff. 2002. The Cinematic Tourist: Perception and Subjectivity, in Dann, GMS., 2002. *The Tourist as a Metaphor for the Social World*. CABI-Publishing. Cambridge-UK.

- Munt, I. 1994. Eco-tourism or Ego-tourism? Race and Class: A Journal for black and third world liberation. Vol. 36 (1), p. 48-60.
- Murphy, Peter E. 1985. *Tourism: A Community Approach*. Methuen. New York.
- Muwardi, W. 1998. Kualifikasi SDM yang Diperlukan Sektor Publik in *Gunawan, M. P. (ed). 1998. Proceeding Pendidikan Pariwisata Menyongsong Era Globalisasi*. Penerbit ITB. Bandung.
- Nelson, J. G. 1999. The Spread of Ecotourism : Some Planning Implication in *Nelson, J.G., Butler, R. and Wall, G. (eds). 1999. Tourism and Sustainable Development: A Civic Approach*. Heritage Resources Centre. Joint Publication No. 2. University of Waterloo.
- Nitsch, B. and J. van Straaten. 1995. Rural Tourism Development : using a sustainable tourism development approach. In *Caccossis, H. and Nijkamp, P. (eds). 1985. Sustainable Tourism Development*. Avebury. Singapore.
- Noble, A. G et al. (eds.) 1998. *Regional Development and Planning for the 21st Century : New Priorities*, New Philosophies. Ashgate. Brookfield.
- Nooy-Talm, H. 1979. *The Sa'dan Toraja (A Study of Their Social Life and Religion)*; The Hague-Martinus Nijhoff. Verhandelingen, van het Koninklijk Instituut Voortaal, Land en Volkerkunde, Leiden. The Netherland.
- Orum, A.M. 1989 (3rd edition). *Introduction to Political Sociology : the social anatomy of the body politik*. Prentice Hall. New Jersey.
- Parikh, R. 1992. *Genesis of Rural Development*. In *Sinha, R.N.P. (ed). 1992. Geography and Rural Development*. Concept Publishing Co. New Delhi.
- Philips, M. and Tim Mighall. 2000. *Society and Exploitation Through Nature*. Prentice Hall. England.
- Poon, Auliana. 1993. *Tourism, Technology and Competitive Strategies*. CAB Int. Wallingford.
- Porteous, J. Douglas. 1977. *Environment & Behaviour: planning and everyday urban life*. Addison-Wesley Publ. Co. Amsterdam.
- Prentice, Richard. 1993. *Tourism and Heritage Attractions*. Routledge. London.
- Prittwitz, Volker von. 1994. *Politikanalyse. LESKE+BUDRICH GmbH*, Opladen.
- Putnam, R. 1996. Who killed civic America. *Prospect*, March 1996, p. 66-72.
- Roe, D., Nigel, L-W., Barry, D-C., 1997. Take Only Photographs, Leave Only Footprints: *the environmental impact of wildlife tourism*. IED Wildlife and Development Series No. 10, September 1997.
- Schuller, Tom and John Field. 1998. Social Capital, Human Capital and the Learning Society. *International Journal of Lifelong Education*. Vol 17 (4), p. 226-235.
- Sears, D. W. , and J. Norman Reid (eds.). 1995. *Rural Development Strategies*. Nelson Hall Publisher. Chicago.
- Shaw, G. and Allan, M. Williams. 1994. *Critical Issue in Tourism*. Blackwell Publisher. Oxford.
- Shelby, B. and Thomas A. Heberlein. 1984. A Conceptual Frame Work for Carrying Capacity Determination. *Leisure Science*, Vol. 6 (4), p. 433-451.
- Sheperd, A. 1998. *Sustainable Rural Development*. Macmillan Press Ltd. London.
- Simmie, J. (ed.) 1997. *Innovation Networks and Learning Regions? Jessica Kingsley Publisher*. London.
- Smith, Stephen L.J. 1989. *Tourism Analysis: A Handbook*. Longman Scientific & Technical. New York.
- Storper, M. 1997. *The Regional World*. The Guilford Press. New York.
- Teo, P., T.C. Chang, and K.C. Ho (eds.) 2001. *Interconnected Worlds: Tourism in Southeast Asia*. Pergamon. Amsterdam.
- Timothy, D. J. 2001. *Tourism and Political Boundaries*. Routledge. London.
- Tricar, Jean and Conrad KiewietdeJonge. 1992. *Ecogeography and Rural Management: A contribution to the International Geosphere-Biosphere Programme*. Longman Scientific & Technical. New York.
- Tsaliki, E. 1992. *Sustainable Tourism and How To Achieve It through Environmental Education: A Case Study on the Island of Kos, Greece*. Univ. Ljubljana.
- Turner, Tom. 1998. *Landscape Planning and Environmental Impact Design (2nd edition)*. UCL Press. London .
- Turener, R.M., et al. 1998. *Kenya's Changing Landscape*. The University of Arizona Press. Tucson.
- Uslaner, Eric M. 1999. Trust but Verify: Social Capital and Moral Behaviour. *Social Science Information*. Vol.38 (1), p. 29-55.
- Verbice, A. 1997. *Rural Tourism and Sustainable Tourism : a case study on Slovenia*. In *De Haan, H., Babis Kasimis, Michael Redclift. (eds). 1997. Sustainable Rural Development*. Ashgate. Singapore.
- Wacquant, Loic. J.D. 1998. *Negative Social Capital : State Breakdown and Social Destitution in Americas's Urban Core*. *Netherland Journal of Housing and the Built Environment*. Vol. 13 (1), p. 25- 40.
- Walle, Alf. H. 1998. *Cultural Tourism: A Strategic Focus*. Westview Press. Oxford.
- Walmsley, D.J. and G. J. Lewis. 1984. *Human Geography: Behavioural Approaches*. Longman Group Ltd. England.
- Walter, T. 1990. *Funerals and How To Improve Them*. Hodder & Stoughton. London.
- Whitten, J., Muslimin, M. and Gregory S. Henderson. 1988. *The Ecology of Sulawesi*. Gajah Mada University Press. Jogjakarta.
- World Bank. 1988. *Targeted Programs for the Poor during Structural Adjustment ; A Summary of Symposium on Poverty and Adjustment*. April 1988. Washington D.C.
- Wrobel, David, M., and Patrick T. Long. (ed.) 2001. *Seeing and Being Seen: Tourism in the American West*. University Press of Kansas. Kansas.
- Zimolzak, Chester E. and Charles A. Stansfield, Jr. 1983. *The Human Landscape: geography and culture*. Charles E. Merrill Publishing Co. Ohio.